

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dapat selesai tepat pada waktunya.

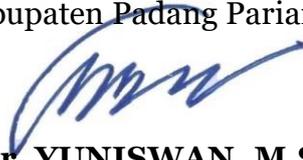
Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan perencanaan lanjutan setelah melalui proses pembahasan rancangan renja baik melalui proses forum OPD, Musrenbang Kecamatan maupun melalui proses Musrenbang Kabupaten yang dilakukan secara berjenjang dengan harapan untuk menjaga konsistensi dan sinergitas dokumen perencanaan.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pedoman semua pihak dalam pembangunan lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Padang Pariaman di Tahun 2021.

Pariaman, Mei 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Padang Pariaman



Ir. YUNISWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199203 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	5
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD	35
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD	41
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	69
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	70
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	72
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi	72
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD	76
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	81
4.1. Program dan Kegiatan	81
BAB V PENUTUP	199

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun Kelima dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021, yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap OPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi. Renja OPD disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 ini dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan dan penganggaran di tahun 2021. Adapun tujuannya adalah mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD. Landasan hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
2. Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu, memuat evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, analisa kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Pada evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Analisis kinerja pelayanan OPD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja mengenai koordinasi dan sinergi program dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.
3. Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja

OPD. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

4. Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, memuat program yang dilaksanakan Perangkat Daerah pada tahun pelaksanaan Renja dan tabel matrik Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021.
5. Bab 5 Penutup, memuat kesimpulan dan saran pelaksanaan rencana kerja.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman adalah penggabungan dari Kantor Lingkungan Hidup dan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan bagian Pertanahan di Sekretariat Daerah. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun $n-2=2021-2=2019$) adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b. Pengadaan tong sampah perumahan dan pertokoan
 - c. Penanganan Kawasan Kumuh
 - d. Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - e. Inventarisasi dan persertifikatan tanah pemda
 - f. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
 - g. Pemantauan kualitas lingkungan
 - h. Pengujian limbah cair dan ijin IPLC
 - i. Pembangunan drainase permukiman
 - j. Fasilitasi pembangunan drainase permukiman
 - k. Pembangunan jalan lingkung (pengaspalan jalan)
 - l. Fasilitasi pembangunan jalan lingkung
 - m. Pembangunan rabat beton jalan di perumahan
 - n. Fasilitasi [embangunan rabat beton jalan di perumahan
 - o. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor

- d. Penyediaan peralatan rumah tangga kantor
 - e. Penyediaan makanan dan minuman
 - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - g. Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran
 - h. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - j. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - k. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - l. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD
 - m. Gerakan sumbar bersih
 - n. Revisi ranperda pengelolaan sampah
 - o. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Perumahan permukiman)
 - p. Penunjang Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah
 - q. Database kawasan kumuh
 - r. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
 - s. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung laboratorium
 - t. Operasional laboratorium
 - u. Peningkatan kapasitas pengelolaan laboratorium lingkungan
 - v. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
 - w. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
 - x. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
 - y. Fasilitasi kegiatan PISEW
 - z. Database prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
 - aa. Pemeliharaan RTH
 - bb. Pemeliharaan median dan kebersihan taman
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - c. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

- d. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
- e. Pengkajian dampak lingkungan
- f. Pengawasan dan penerbitan ijin LB3
- g. Penanganan pengaduan masyarakat mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan
- h. Program kampung iklim

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja, Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kabupaten Padang Pariaman

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bidang Urusan Lingkungan Hidup										
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang ditindaklanjuti selama satu tahun	8250	9284	1500	2654	176,93	1500	13438	162,88
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	36	12	12	100,00	12	60	83,33
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pelaksanaan pembayaran jasa administrasi keuangan	149	62	30	28	93,33	28	118	79,19

	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan pelaksanaan kebersihan kantor	72	36	12	12	100.00	12	60	83,33
	Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1	-	1	1	100,00	2	3	300
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan buku Undang-undang yang disediakan	28	25	5	6	120.00	4	35	125
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	72	36	12	12	100.00	12	60	83,33
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	72	36	12	12	100.00	12	60	83,33
	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	Terselenggaranya jasa pendukung perkantoran	48	-	12	12	100.00	12	24	50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	12	12	-	-	0	-	12	100
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor dan laboratorium	6	3	7	9	128,57	1	13	216,67
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan laboratorium	72	36	12	12	100.00	0	60	83,33
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	24	12	4	4	100.00	4	20	83,33

	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	72	36	12	12	100.00	12	60	83,33
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan	101	61	20	23	115.00	5	89	88,12
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan yang disusun	45	49	4	4	100,00	4	57	126,67
	Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan penganggaran yang disusun	24	-	8	8	100,00	8	16	66,67
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan										
	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan	Jumlah timbulan sampah yang dapat dikelola dalam 1 tahun di Kabupaten Padang Pariaman	207000	53009	28000	23028	82,24	28000	104037	50,26
	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	6	2	1	3	300.00	1	6	100
	Pembangunan dam parit pembuangan sampah	Jumlah dam parit yang dibangun	1	1	0	0	0	0	1	100
	Pembenahan tempat pembuangan akhir (TPA Sampah)	Jumlah TPA yang dibenahi	1	0	0	0	0	1	1	100

	Gerakan Sumbar Bersih	Jumlah Kecamatan yang dibina dalam kegiatan GSB	10	5	1	1	100,00	0	6	60
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH	150	100	0	0	0	0	100	66,67
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah sungai yang dipantau	55	13	11	4	36,36	5	22	40
	Pengujian Limbah cair dan izin IPLC	Jumlah titik baku mutu air limbah usaha	72	11	14	14	100,00	1	26	36,11
	Pengawasan dan penerbitan izin LB3	Terlaksananya pengawasan dan penerbitan izin LB3	144	25	24	27	112,5	1	53	36,81
	Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat yang di	29	4	5	6	120	0	10	34,48
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH	272	75	50	40	80,00	25	140	51,47
	Pengkajian dampak lingkungan	Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan	203	61	50	36	72,00	15	112	55,17
	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Terlaksananya penyusunan dokumen kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH	1	1	1	1	100	1	3	300

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam										
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terlaksananya pengendalian dampak perubahan iklim	46	10	3	2	66,67	0	12	26,09	
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam										
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	260	40	50	50	100	0	90	34,62	
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Terlaksananya peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber air	40	10	0	0	0	0	10	25	
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	Terlaksananya peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan	2	1	0	0	0	0	1	50	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup										
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksananya peningkatan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan	316	51	40	65	162,50	0	116	36,71	
Pengembangan data dan informasi lingkungan (SLHD)	Terlaksananya pengembangan data dan informasi lingkungan	2	2	0	0	0	0	2	100	
Pengembangan data dan informasi lingkungan (IKPLHD)	Terlaksananya pengembangan data dan informasi lingkungan	8	2	0	0	0	0	2	25	

Program Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan kualitas akses informasi lingkungan hidup										
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah sekolah yang diikutsertakan dalam pembinaan adiwiyata	316	51	40	65	162,50	5	117	37,03	
Program Kampung Iklim (Proklam)	Jumlah kelompok proklam yang dibina	46	10	3	2	66,67	2	15	32,61	
Program peningkatan pengendalian polusi										
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Terlaksananya pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	67	18	12	28	233,33	12	58	86,57	
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)										
Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	100	60	20	20	100,00	20	100	100	
Pemeliharaan median dan kebersihan taman		50	20	10	10	100,00	10	40	80	
Program Pembangunan Saluran Dainase/Gorong-gorong										
Pembangunan Saluran Dainase / Gorong-gorong	Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong	1	1	0	0	0	0	1	100	
Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman										
Program Pengembangan Perumahan										
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK Perumahan Permukiman)	Jumlah kegiatan fasilitasi DAK perumahan yang dilaksanakan	5	3	1	1	100,00	1	5	100	

	Penunjang fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah kegiatan penunjang fasilitasi yang dilaksanakan	5	3	1	1	100,00	1	5	100
	Penunjang Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya		1	1	-	-	-	-	1	100
Program Lingkungan Sehat Perumahan										
	Pembangunan drainase perumahan	Jumlah lokasi pembangunan drainase di perumahan yang dilaksanakan	15	2	1	0	0	0	2	13,33
Bidang Urusan Pertanahan										
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah										
	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Luas lahan yang dibebaskan	163,603	47,944	28	77	275,00	5	129,977	79,45
	Inventarisasi dan Pensertifikatan Tanah Pemda	Jumlah sertifikat tanah asset pemda	21	8	10	4	40	3	15	71,43
	Operasional/ Pengadaan dan Pembebasan Tanah	Luas tanah yang diganti rugi	1	1	0	0	0	0	1	100
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan										
	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah kasus/konflik pertanahan yang terjadi pada tahun direncanakan	38	5	8	8	100	5	18	47,37

Pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Tahun 2019 sebesar Rp 16.593.049.462,75. Dana tersebut dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 273.362.000,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp 4.998.409.000,00, dan belanja modal sebesar Rp 11.321.278.462,75. Realisasi serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai Rp 16.249.458.450,00 (97,93 %) dengan realisasi fisik mencapai 100%. Realisasi ini telah memenuhi prinsip 3E, dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp 262.905.000,00 atau 96,17 %, belanja barang dan jasa sebesar Rp 4.804.261.454,00 atau 96,12 %, dan belanja modal sebesar Rp 11.182.291.996,00 atau 98,77 %.

Adapun rincian masing-masing program kegiatan adalah:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Anggaran sebesar Rp 1.065.150.000,00 dan realisasi Rp 1.059.519.621,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 99,47% dan pada umumnya target kinerja dapat tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Anggaran sebesar Rp 745.550.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 744.661.463,00 atau sebesar 99,88 %. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk terciptanya pengelolaan persampahan dengan baik . Dari target yang ditetapkan sebesar 28.000 m³ sampah yang dikelola terealisasi sebesar 23.038 m³. Kegiatan ini telah dilaksanakan di 20 (dua puluh) lokasi yaitu di Pasar Usang, Pasar Sicincin, Pasar Kampung Dalam, Pasar Sungai Limau, RSUD Padang Pariaman, PT. Angkasa Pura II, PT. Bumi Sarimas Indonesia (BSI), PT. Japfa Indonesia Comfeed Tbk., PT. Usaha Inti Padang, Rumah Sakit Paru, Puskesmas Lubuk Alung, SMPN 1 Lubuk Alung, SMPN 1 Sintoga, SMAN 1 Batang Anai, SMPN 1 Enam Lingkung, Pasar Pakandangan, Pesantren Nurul Yaqin, Rumah Makan Kiambang Raya, PT. PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Unit

Pelaksana Pembangkitan Bukittinggi PLTA Singkarak dan Kota Pariaman.

2. Gerakan sumbar Bersih

Anggaran sebesar Rp. 37.400.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.162.000,00 atau sebesar 94,02%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk terciptanya kesadaran masyarakat terhadap penanganan sampah. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Enam Lingsung. Bentuk kegiatan ini adalah melakukan perbaikan/gotong royong dari masyarakat dan kecamatan untuk memperbaiki lingkungan sehingga dapat memperindah lingkungan, membersihkan riol. Dari kantor lingkungan hidup dibantu dengan pembelian peralatan kebersihan dan tong sampah untuk masing-masing kantor, sekolah, mesjid yang berada di kecamatan.

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan

Anggaran sebesar Rp 273.650.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 231.926.658,00 atau sebesar 99,37 %. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk tersedianya sarana dan prasarana untuk mengurangi timbunan sampah dari Pasar Nagari / Kecamatan dan sampah domestik di Kabupaten Padang Pariaman. Target kegiatan ini adalah tersedianya 2 (dua) jenis sarana dan prasarana persampahan dengan realisasi sebanyak 3 (tiga) jenis Pada kegiatan ini telah dilaksanakan pembelian 2 (dua) unit Becak Motor, 5 (lima) unit bak Arm roll, 1 (satu) unit Sepeda Motor .

4. Revisi Renperda Pengelolaan Sampah

Anggaran sebesar Rp 8.550.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 7.769.500,00 atau sebesar 90,87 %. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah selesainya revisi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Padang Pariaman. Bentuk kegiatan ini adalah dengan cara berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Padang Pariaman Serta Provinsi Sumatera Barat. Terakhir diadakan rapat pembahasan dengan melibatkan Bagian Hukum Kabupaten Padang Pariaman dan Staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Bidang Pengolahan Sampah. Rapat tersebut diselenggarakan pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Anggaran sebesar Rp 2.077.657.000,00 dan realisasi Rp 1.928.554.122,00. Pelaksanaan 5 kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 92,82 %, sementara target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Anggaran Rp 91.175.000,00 dan realisasi sebesar Rp 90.355.500,00 atau sebesar 99,10 %. Dari target Pengawasan sebanyak 50 (lima puluh) yang dilakukan terhadap Usaha/ Kegiatan telah dilakukan pengawasan sebanyak 40 (empat puluh) kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|--|
| 1. | PT. Charoen Pokphand Jaya Farm | 21 | PT. PLN. Unit Diklat Padang |
| 2. | PT. Anugerah Jaya Multiplikasi | 22 | PT. Bina Riau Sarana |
| 3. | PT. Bina Sejati / SPBU | 23 | PT. Kunango Jantan |
| 4. | PT. Andalas Anai Permai | 24 | PT. Nasiotama Karya Bersama |
| 5. | PT. Air Dingin | 25 | PT. Citra Muda Noer Bersaudara |
| 6. | PT. Hotel Minang Jaya Mandiri | 26 | PT. LMKP |
| 7. | PT. PLN (Persero) Singkarak | 27 | PT. Naras Sehati |
| 8. | PT. Pahlawan Utama Sejahtera / SPBU | 28 | PT. Palapa Sejahtera |
| 9. | PT. Jaya Sentrikon Indonesia | 29 | CV. Geopatra |
| 10. | PT. Prizaco Gasindo | 30 | PT. Yasiga Sarana Utama |
| 11. | PT. Nusantara Beta Farma | 31 | PT. Anveve Ismi Berjaya |
| 12. | DPPU BIM | 32 | Pertambangan Mineral Batuan (Jenis Trass), |

13.	PT. Kunango Jantan	33	PT. Sumatera Alam Raya
14.	PT. Usaha Inti Padang	34	PT. Japfa Comfeed Indonesia TBK
15.	PT. Japfa Comfeed Indonesia	35	RSUD Padang Pariaman
16.	PT. Rimbo Paraduan	36	PT. Lubuk Minturun Konstruksi Persada
17.	PT. Artho Langeng Mandiri	37	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Farm I Padang
18.	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	3	PT. Bumi Sarimas Indonesia
19.	Gudang Kasai PLN	39	Sarana Mitra Saudara
20.	PT. PLN (Persero) Singkarak	4 0.	PT. Kunango Jantan

2. Pengkajian Dampak Lingkungan

Anggaran Rp 70.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 69.059.650,00 atau sebesar 98,66 %. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan para pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan usaha/kegiatannya serta memberikan pelayanan dan ruang kepada masyarakat untuk turut serta dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 114 permohonan izin lingkungan dari masyarakat yang masuk dan sudah ditindaklanjuti yang terdiri dari 27 usaha/ kegiatan dengan dokumen lingkungan berupa dokumen Amdal dan UKL-UPL (atau yang setara) dan 87 SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).

3. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Anggaran Rp 150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 113.299.700,00 atau sebesar 75,53%. Target kegiatan ini adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen dengan realisasi tersusunnya 1 (dokumen) yaitu Dokumen RPPLH yang tahapan penyusunannya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan konsultasi public dalam rangka menginventarisasi dan menjaring isu-isu strategis dari semua stake holder (perangkat daerah yang terkait baik di Kabupaten Padang Pariaman maupun di Provinsi Sumbar, DPRD Kabupaten Padang Pariaman, perwakilan masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi). Isu-isu yang terjaring kemudian digodog lagi, sehingga akhirnya ditetapkan sebagai isu strategis prioritas.
 2. Tahapan berikutnya dilakukan rapat penyusunan RPPLH dengan perangkat daerah terkait dengan bimbingan/ panduan dari tenaga ahli dari Perguruan Tinggi yang memiliki kompetensi dalam penyusunan RPPLH.
 3. Selanjutnya kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman mulai dari Bab I hingga Bab V dilakukan dengan cara konsinyering yang melibatkan anggota tim teknis dan tenaga ahli.
 4. RPPLH yang telah disusun kemudian dikoordinasikan dan disinkronkan dengan RPPLH Provinsi Sumbar terlebih dulu sebelum dicetak dan dijilid.
3. Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Anggaran Rp 64.940.000,00 dan realisasi sebesar Rp 64.367.842,00 atau sebesar 99,12 %. Kegiatan ini melakukan pemantauan terhadap kualitas air permukaan (sungai, sumber mata air) yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Sungai yang dipantau adalah bagian hilir, tengah dan bagian hulu. Pemantauan ini berlaku untuk sungai yang tidak pendek. Contohnya Sungai Batang Limau, Sungai Batang Kamumuan dan sungai Batang Ulakan. Sedangkan untuk ukuran sungai yang panjang dilakukan pemantaun pada 5 (lima) titik. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Batang Tapakis dan Sungai Batang Naras. Sedangkan untuk sumber mata air (Lubuk Bonta, Tirta Alami dan Lubuk Cimantuang) sampel diambil pada 1 titik, begitu juga dengan air laut (Pantai Tiram, Arta dan Pantai Gasan). Parameter yang diuji adalah pH, DO, TDS, DHL dan konduktivitas. Sedangkan untuk parameter logam dilakukan pengujian di Dinas Lingkungan

Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pengujian Limbah Cair dan Izin IPLC

Anggaran Rp 61.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 57.881.459,00 atau sebesar 94,89 %. Kegiatan pengujian limbah cair dan izin IPLC berupa verifikasi lapangan terhadap permohonan izin IPLC dan pengawasan Izin IPLC terhadap perusahaan yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Perusahaan yang diverifikasi adalah 7 perusahaan antara lain:

- a. PT. Kunango Jantan
- b. PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Batang Anai
- c. PT. Angkasa Pura II
- d. PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (Lubuk Alung)
- e. PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (Patamuan)
- f. PT. Sumatera Tropical Spices.
- g. PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (2x11 Kayu Tanam).

Keluaran yang diperoleh dari verifikasi tersebut yaitu berupa berita acara verifikasi dan surat rekomendasi teknis telah terpenuhinya izin atau belum terpenuhinya izin secara teknis.

6. Pengawasan dan Penertiban Izin LB3

Anggaran Rp 55.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 54.659.302,00 atau sebesar 99,38 %. Kegiatan ini berupa verifikasi lapangan terhadap permohonan izin TPS LB3 dan pengawasan pengelolaan limbah B3 bagi perusahaan yang sudah memilikinya. Jumlah kegiatan verifikasi lapangan yang telah dilaksanakan terdiri dari 7 (tujuh) perusahaan antara lain :

PT. Jaya Sentrikon Indonesia

PT Rimbo Paraduan

PT Sumatera Tropical Spices

PT Charoen Pokphand Jaya Farm
(Salibutan Lubuk Alung)
PT Kunango Jantan

PT Karya Empat Pilar

PT Charoen Pokphand Jaya Farm
(Tandikek Patamuan

Jumlah kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dan izin TPS Limbah B3 terdiri dari 20 (dua puluh) perusahaan/ kegiatan antara lain:

Rumah Sakit Paru,

PT Karya Empat Pilar,

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Batang Anai),

PT Kunango Jantan,

PT Prizaco Grasindo

PT Nusantara Beta Farma

PT Bumi Sarimas Indonesia

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (2x11 Kayu Tanam)

PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (Aia Tajun Lubuk Alung)

PT. Anugrah Jaya Multiplikasi.

PT Statika Mitra Sarana (Batang Anai)

PT Agrimita Utama Persada,

PT Jaya Sentrikon Indonesia

PT Angkasa Pura II

PT Usaha Inti Padang

Sumatera Tropical Spices

Rimbo Paraduan

RSUD Kab. Padang Pariaman

PT PLN Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Selatan Unit Pelaksana pembangkit Bukittinggi

PT Hutama Karya Infrastruktur Proyek Tol Padang –Sicincin.

7. Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Anggaran sebesar Rp 13.580.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 8.116.000,00 atau sebesar 59,76 %. Dari target 5 (lima) kasus , realisasi sebanyak 6 (enam) kasus/pengaduan masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti sesuai dengan Permen LH Nomor 09 tahun 2010, yaitu:

- Melakukan verifikasi pengaduan masyarakat ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung,
- Melakukan Verifikasi pengaduan masyarakat Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan tentang perizinan tambang galian C di wilayah Tungka dan sekitarnya
- Pengaduan masyarakat (Sdri. Onna Natalia) terkait adanya usaha/kegiatan Peternakan ayam di Korong kandang AmpekNagari guguk Kecamatan 2x11 Kayu Tanam
- Verifikasi pengaduan masyarakat terhadap usaha/kegiatan Sawmill yang membuang limbah kesungai
- Verifikasi pengaduan masyarakat terhadap usaha/kegiatan peternakan ayam d korong Batu Caluang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang
- . Verifikasi pengaduan masyarakat terhadap usaha/kegiatan peternakan ayam di korong Rimbo Karambia Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis

Realisasi keuangan hanya sebesar 59,76, disebabkan karena kegiatan baru bisa dilaksanakan dan ditindak lanjuti apabila ada pengaduan dari masyarakat tentang lingkungan.

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Laboratorium

Anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 atau sebesar 100 %. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain memperbaiki peralatan peralatan laboratorium lingkungan.

9. Operasional Laboratorium

Anggaran sebesar Rp 264.750.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 243.611.653,00 atau sebesar 92,02 %. Bentuk kegiatan ini adalah pemasangan listrik sehingga kapasitas pengelolaan laboratorium meningkat dan dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk menambah PAD Kab Padang Pariaman.

10. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

Anggaran sebesar Rp 1.257.212,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 1.177.203.216,00 atau sebesar 93,64 %. Bentuk kegiatan ini adalah untuk melengkapi sarana dan Prasarana Laboratorium dan pengadaan alat penunjang laboratorium, sehingga Laboratorium Lingkungan Kab Padang Pariaman bisa menuju Akreditasi Nasional.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Anggaran sebesar Rp125.640.000,00 dan realisasi Rp124.310.400,00. Satu kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 98,94%, target kinerja dapat tercapai.

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup

Anggaran sebesar Rp125.640.000,00 dan realisasi Rp124.310.400,00 atau sebesar 98,94%. Kegiatan ini bertujuan untuk sekolah-sekolah yang memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Anggaran sebesar Rp 89.490.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 88.355.000,00 atau sebesar 98,73 %. Kegiatan ini bertujuan untuk sekolah-sekolah yang memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Pencapai Adiwiyata Tahun 2019 sbb :

- Sekolah Adiwiyata Kabupaten 9 (sembilan) sekolah
- Sekolah Adiwiyata Propinsi 6 (enam) sekolah

- Sekolah Adiwiyata Nasional diusulkan 7 (tujuh) sekolah
- Sekolah Adiwiyata Mandiri diusulkan 2 (dua) sekolah

2. Program Kampung Iklim(Proklam)

Anggaran sebesar Rp 36.150.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 35.955.400,00 atau sebesar 99,46 %. Kegiatan ini bertujuan Meningkatkan kepedulian dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mengendalikan Dampak Perubahan Iklim di Kabupaten Padang Pariaman. Dampak yang akan dicapai secara global adalah mewujudkan komitmen Indonesia menurunkan emisi sebesar 26% di bawah *business as usual* pada tahun 2020. Dari 7 kelompok yang dibina diusulkan 5 (lima) kelompok ke tingkat nasional dan diverifikasi pada bulan Agustus 2019 oleh Tim KLHK dan penetapannya pada bulan November 2019.

Kabupaten Padang Pariaman menerima penghargaan sebagai berikut :

- Penghargaan Kepada Pemerintah Padang Pariaman (Bupati) berupa piagam
- Proklam KWT Batu Tapo di Korong Koto Tinggi Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur diberikan penghargaan dari Kemen KLHK dengan Kategori Proklam Utama, berbentuk Piagam Penghargaan
- Proklam KWT Mamaceria Korong Ringan-ringang Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung, diberikan penghargaan KemenKLHK Kategori Proklam Utama berbentuk Piagam Penghargaan

4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Anggaran sebesar Rp31.357.000,00 dan realisasi Rp29.289.600,00. Satu kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 93,41%, target kinerja dapat tercapai.

Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri

Anggaran Rp31.357.000,00 dan realisasi Rp29.289.600,00 atau sebesar 93,41%. Kegiatan ini melakukan pemantauan terhadap perusahaan yang dilakukan pembinaan adalah PT. Rimbo Paraduan di Kecamatan Batang

Anai, PT. Jaya Sentrikon di Kecamatan Batang Anai, PT. Kunango Jantan di Kecamatan Batang Anai, PT. Usaha Inti Padang di Kecamatan Batang Anai, PT. Statika Mitra Sarana di Kecamatan 2x11 Kayutanam, PT. Sumatera Tropical Spices di Kecamatan Batang Anai, PT. Prizaco Gasindo & Transindo Putra Utamadi Kecamatan Batang Anai, PT. Japfa Comfeed Indonesia di Kecamatan Batang Anai, PT. Anugrah Jaya Multiplikasi di Kecamatan Batang Anai, PT. Charoen Pokphand Jaya di Kecamatan Lubuk Alung, PT. Japfa Comfeed Indonesia Unit Farm 1 di Kecamatan 2x11 Kayutanam, PT. Japfa Comfeed Indonesia di Kecamatan Batang Anai.

5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Anggaran sebesar Rp685.780.000,00 dan realisasi Rp676.004.830,00. Dua kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 98,57%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan RTH

Anggaran sebesar Rp47.825.000,00 dan realisasi Rp47.398.900,00 atau sebesar 99,11 %. Kegiatan ini diperuntukkan untuk gaji/ honor pekerja lapangan (honor petugas di taman kehati). Jumlah tenaga kerja lapangan sebanyak 2 (dua) orang dengan honor per orang per bulan sebesar Rp1.600.000,-. Selain itu untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau telah dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang kotoran sapi dan urea

2. Pemeliharaan Median dan Kebersihan Taman

Kegiatan ini anggarannya sebesar Rp637.955.000,00 dengan realisasi sebesar Rp628.605.930,00 dengan realisasi sebesar 98,53%. Maksud dan tujuan kegiatan ini diperuntukkan untuk gaji/honor pekerja lapangan/petugas Taman dan tenaga administrasi dari bulan Januari s/d Oktober 2019. Petugas Administrasi sebanyak 1 (satu) orang dengan ijazah S1 dengan honor perbulan Rp. 1.800.000,00 dan 2 (dua) orang dengan ijazah SMA dengan honor per orang per bulan sebanyak Rp1.600.000 dan Petugas Kebersihan berjumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang tersebar di wilayah Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Enam Lingkung, dan Kecamatan V Koto Kampung Dalam,

dan Kecamatan Ulakan Tapakis dengan honor per orang per bulan sebesar Rp1.600.000,- dan untuk belanja pemeliharaan taman digunakan untuk upah dan pembelian sarana pendukung untuk pemeliharaan dan pembuatan taman di wilayah median jalan di wilayah Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Enam Lingsung

6. Program Pengembangan Perumahan

Anggaran sebesar Rp467.290.000,00 dan realisasi Rp460.200.229,00. Dua kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 98,48%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK Perumahan Permukiman)

Anggaran sebesar Rp137.290.000,00 dan realisasi Rp135.760.000,00 hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 98,89%. Kegiatan ini bertujuan untuk pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan sasarannya untuk meningkatkan rumah tidak layak huni sebanyak 162 unit menjadi rumah layak huni pada tahun 2019. Dari hasil yang telah dicapai dari kegiatan ini, sebanyak 162 unit rumah layak huni telah selesai dikerjakan 100 % dari total 162 unit rumah (sesuai dengan SK Bupati)

2. Penunjang Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Anggaran Rp330.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp324.440.229,00 atau sebesar 98,32%. Kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik realisasi fisik berupa, tuntasnya dana penunjang Operasional fasilitasi dan Stimulus untuk seluruh kegiatan dibidang PKP sepanjang tahun 2019. Dampak dari kegiatan penunjang fasilitasi dan Stimulus ini dapat diperoleh manfaatnya oleh masyarakat karena kegiatan BPS peningkatan rumah tidak layak huni menjadi layak huni sangat dirasakan manfaatnya oleh 162 penerima bantuan

7. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Anggaran sebesar Rp394.575.000,00 dan realisasi Rp373.450.450,00. Program ini sudah terlaksana hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 94,65%. Adapun rincian capaian kegiatan sebagai berikut:

Pembangunan Drainase Perumahan

Anggaran Rp394.575.000,00 dan realisasi sebesar Rp373.450.450,00 atau sebesar 94,65%. Kegiatan ini ditargetkan 2 (dua) lokasi yaitu Korong Kampung Apar Tengah Nagari Sungai Buluh Utara dan Korong Kampung Apar Utara Nagari Sungai Buluh Utara Kec. Batang Anai. Namun yang dapat terealisasi hanya 1 (satu) yaitu Korong Kampung Apar Tengah Nagari Sungai Buluh Utara Kec. Batang Anai sementara yang di Korong Kampung Apar Utara Nagari Sungai Buluh Utara Kec. Batang Anai tidak terlaksana dikarenakan kegiatan fisik di daerah tersebut tidak dikerjakan oleh masyarakat setempat, dengan kata lain ada oknum masyarakat yang harus menghandle pekerjaan tersebut walaupun dengan kualitas minim dan jika tetap dikerjakan oleh kontraktor maka pekerjaan dilapangan tidak boleh dikerjakan oleh oknum tersebut.

Adapun rician kegiatan sebagai berikut:

1. Database Kawasan Kumuh

Anggaran sebesar Rp 384.600.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 363.975.450,00 atau sebesar 94,64 %. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun database kawasan kumuh sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi database kawasan kumuh. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya satu informasi kawasan kumuh untuk mempermudah pencarian data dalam perencanaan penanganan kawasan kumuh. Selain itu sasarannya adalah tersedianya dokumen buku profil kawasan kumuh Kabupaten Padang Pariaman. Output dari kegiatan ini adalah dapat membantu penentuan daerah / kawasan yang lebih diprioritaskan dalam penerimaan bantuan untuk meningkatkan kualitas kawasan pemukiman.

2. Penanganan Kawasan Kumuh

Anggaran sebesar Rp 9.975.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 9.475.000,00 atau sebesar 94,99 %. Seiring dengan

berjalannya waktu , dengan terjadinya rasionalisasi anggaran pada saat APBD Perubahan , mengakibatkan kegiatan fisik tidak dapat dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran.

8. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Anggaran sebesar Rp10.438.276.465,75 dan realisasi Rp10.363.455.567,00 atau sebesar 99,28 %, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Anggaran Rp10.183.076.462,75 dan realisasi Rp10.111.620.544,00 atau sebesar 99,30%. Bentuk kegiatan ini adalah untuk melakukan pengadaan dan pembebasan lahan masyarakat yang terkena bangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya pembebasan lahan untuk pembangunan fasilitas umum, maka terdapat pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sehingga dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian dan SDM warga semakin meningkat dan akan terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat. Dari Target yang direncanakan untuk penggantian ganti rugi tanah sebesar 230.000M² realisasi hanya 77.426 M², hal ini disebabkan karena adanya pemotongan anggaran pada saat APBD Perubahan

2. Inventarisasi dan Pensertifikatan Tanah Pemda

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan bukti secara hukum seluruh tanah yang sudah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Sasaran kegiatan ini adalah dengan tujuan untuk menginventarisasi dan mengatur pengalokasian tanah negara yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum sesuai dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman. Dari target yang direncanakan 50 (lima puluh) sertifikat realisasi hanya 8 (delapan), hal ini disebabkan karena selain adanya rasionalisasi anggaran pada saat APBD perubahan juga disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang tujuan arti pembangunan, dan masih adanya provokasi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan tentang

inventarisasi dan pembebasan lahan warga yang terkena imbas pembangunan kepentingan umum serta sulitnya melakukan pembebasan dan pengadaan tanah karena umumnya status tanah di Kabupaten Padang Pariaman merupakan tanah ulayat/pusako.

9. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Anggaran sebesar Rp 50.995.000 dan realisasi Rp 45.785.900,00. Satu kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 89,79%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

Anggaran Rp 50.995.000,00 dan realisasi Rp 45.785.900,00 atau sebesar 89,79%. Bentuk kegiatan ini adalah dalam bentuk Sosialisasi Peningkatan Peranserta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam dilaksanakan satu kali dengan peserta berjumlah 50 (lima puluh) orang dengan peserta terdiri dari OPD 3 orang, 42 orang dari Kecamatan dan 5 orang dari kelompok Masyarakat.

10. Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman (PIP)

Anggaran sebesar Rp 122.500.000,00 dan realisasi Rp 119.754.9920,00. Dua kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 98,57%, target kinerja dapat tercapai, sedangkan dua kegiatan lagi tidak terlaksana karena adanya pemotongan anggaran. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Kegiatan Pisew

Kegiatan ini anggarannya sebesar Rp 20.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.220.7892,00 atau sebesar 96.10%.Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya suatu perangkat kerja dan fasilitas untuk membantu tugas tim pelaksana kegiatan PISEW tahun 2019 yang tepat mutu, tepat biaya dan tertib administrasi. Dengan dilaksanakan kegiatan ini diperoleh manfaat diantaranya untuk memfasilitasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur social ekonomi wilayah (PISEW) dalam

skala kawasan yang efektif, efisien, tepat mutu, tepat biaya dan tertib administrasi

2. Database Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Kegiatan ini anggarannya sebesar Rp 97.830.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 95.864.200,00 atau sebesar 97,99%. Target Kegiatan ini menyediakan 1 (satu) dokumen PSU sebagai acuan atau pedoman bagi pihak developer untuk menyediakan perumahan yang indah, aman, dan nyaman di Kab Padang Pariaman dan sudah terealisasi sebanyak 1 (satu) dokumen

3. Fasilitasi Pembangunan Drainase Pemukiman

Kegiatan ini anggarannya sebesar Rp 3.305.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.305.000,00 atau sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam hal monitoring dan evaluasi di lapangan, kordinasi ke perangkat nagari dan kecamatan . Seiring dengan berjalannya waktu , dengan terjadinya rasionalisasi anggaran pada saat APBD Perubahan , mengakibatkan kegiatan fisik tidak dapat dilaksanakan

4. Fasilitasi pembangunan Jalan Lingkung

Kegiatan ini anggarannya sebesar Rp 1.365.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.365.000,00 atau sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam hal monitoring dan evaluasi di lapangan, kordinasi ke perangkat nagari dan kecamatan . Seiring dengan berjalannya waktu , dengan terjadinya rasionalisasi anggaran pada saat APBD Perubahan , mengakibatkan kegiatan fisik tidak dapat dilaksanakan

11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran sebesar Rp731.037.000,00 dan realisasi Rp683.750.846,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 93,53%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran Rp30.810.000,00 dan realisasi Rp30.587.215,00 atau sebesar 99,28%. Kegiatan Jasa Penyediaan Surat Menyurat dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat menyurat. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian surat menyurat kantor selama

tahun 2019 dan penyusunan beberapa laporan berbagai kegiatan rutin serta surat dinas lainnya dapat terpenuhi.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran Rp76.000.000,00 dan realisasi Rp36.347.883,00 atau sebesar 47,83%. Hal ini disebabkan karena kantor Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sebelumnya berada di UPT labor pada Tahun 2017, dengan telah adanya tempat kantor yang baru di Tahun 2018, maka Labor tersebut tidak dipakai lagi. Pada pertengahan Tahun 2019 labor di fungsikan kembali, arus listrik semenjak kantor Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman pindah ke Pariaman tidak hidup, setelah labor difungsikan lagi maka arus Listrik dihidupkan kembali, dalam menghidupkan listrik labor, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman harus menambah daya karena daya yang ada, tidak dapat menampung arus untuk Peralatan Labor. Dari bulan Agustus s/d Desember 2019 arus yang terpakai hanya memakai rekening prabayar. Untuk merubah dari prabayar ke pasca bayar ,PLN harus merubah kembali daya yang ada ke daya yang lebih besar karena arus listrik labor harus mempunyai daya yang lebih besar dan tidak bisa memakai prabayar, sedangkan anggaran untuk rekening listrik labor di adakan dalam anggaran perubahan, PLN melakukan penambahan daya UPTD Labor DLHPKPP dilaksanakan di Bulan Desember 2019, sehingga anggaran yang tersedia untuk pembayaran rekening listrik tidak terpakai.

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Anggaran Rp245.412.000,00 dan realisasi Rp239.780.000,00 atau sebesar 97,31%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi penyediaan jasa tim pengelola keuangan daerah pada LHPKPP. Selama Tahun 2019 penyediaan jasa administrasi keuangan sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, dimana 27(dua puluh tujuh) orang untuk 12 (dua belas)bulan, dan 1 orang untuk 7 (tujuh) bulan dan dapat terwujud pada Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman ini untuk dapat meningkatkan pelayanan administrasi terkait dengan keuangan yang tepat waktu dan tertib administrasi.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Anggaran Rp77.600.000,00 dan realisasi Rp77.598.500,00 atau sebesar 100,00%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor selama 12 bulan meliputi penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dan lingkungan kantor dan tersediannya kebutuhan untuk kebersihan kantor. Selama Tahun 2019 penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dapat terwujud pada kantor LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan jasa tenaga swakelola (Non PNS) sebagai pegawai kontrak sebanyak 3 (tiga) orang untuk 12 bulan.

5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor

Anggaran sebesar Rp. 3.595.000 dan realisasi Rp. 3.528.000 atau sebesar 98,14%.Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi penyediaan peralatan rumah tangga kantor, sehingga peralatan rumah tangga kantor dapat tersedia. Dari target sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil yang telah dicapai adalah tersedianya peralatan rumah tangga kantor di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 1 (satu) paket.

6. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran Rp8.000.000,00 dan realisasi Rp7.227.000,00 atau sebesar 90,34%. Dari target kegiatan ini sebanyak 5 (macam) jenis bahan bacaan dapat disediakan bacaan berupa surat kabar/koran harian lokal sebanyak 2 (dua) macam, 1 (satu) macam koran nasional, 1 (satu) macam koran mingguan, 2 (dua) macam majalah seperti Harian Umum Singgalang, Pos Metro, Kompas, Tabloid Nova, Majalah Tempo, dan metro talenta dan 13 buah buku bacaan dan peraturan perundang undangan.

7. Penyediaan Makanan dan Minuman

Anggaran Rp12.620.000,00 dan realisasi Rp11.919.600,00 atau sebesar 94,45%. Penyediaan makanan dan minuman rapat selama tahun 2019 dapat disediakan. Penyediaan makanan dan minuman rapat pelaksanaannya sesuai dengan agenda rapat yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Anggaran Rp212.200.000,00 dan realisasi Rp211.962.648,00 atau sebesar 99,89%. Selama tahun anggaran 2019 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Pariaman mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah untuk dapat meningkatkan Koordinasi dan konsultasi dengan pihak lain yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.

8. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

Anggaran Rp64.800.000,00 dan realisasi Rp64.800.000,00 atau sebesar 100%. Kegiatan ini terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan yaitu untuk pembayaran Gaji/Honor Swakelola yang ditugaskan untuk membantu pekerjaan Administrasi Kantor dikarenakan Kantor Dinas LHPKPP masih kekurangan Pegawai.

9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor

Anggaran sebesar Rp 3.595.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 3.528.000,00 atau sebesar 98,14%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi penyediaan peralatan rumah tangga kantor, sehingga peralatan rumah tangga kantor dapat tersedia. Dari target sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil yang telah dicapai adalah tersedianya peralatan rumah tangga kantor di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 1 (satu) paket.

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp213.192.000,00 dan realisasi Rp200.022.399,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 93,82%, dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Anggaran Rp119.100.000,00 dan realisasi Rp118.257.269,00 atau 99,29%. Kegiatan ini terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan yaitu untuk Pembelian Bendera Panjang 1 (satu) buah, 1 (paket) gordyn, dan 2 (dua) unit Komputer, 1 (unit) lap top, 12 (dua belas) unit printer 3

(tiga) unit lemari arsip, 1 (satu) unit Proyektor, 1 (satu) unit layar proyektor, 15 (lima belas) unit teralis besi, dan 1 (satu) unit AC.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran Rp84.707.000,00 dan realisasi Rp75.217.421,00 atau sebesar 88,80%. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan target terpeliharanya sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2. Realisasi keuangan kegiatan pemeliharaan dilakukan sesuai kebutuhan dan jumlah kendaraan dinas pada Tahun 2019.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Anggaran Rp9.385.000,00 dan realisasi Rp6.547.709,00 atau sebesar 69,77%. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain adalah pemeliharaan dan perbaikan AC, komputer, printer dan pengantian kunci-kunci laci meja yang rusak pada Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman.

13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Anggaran sebesar Rp47.200.000,00 dan realisasi Rp46.267.324,00 atau sebesar 98,02%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif, dengan rincian Kegiatan sebagai berikut:

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Anggaran sebesar Rp47.200.000,00 dan realisasi Rp46.267.324,00 atau sebesar 98,02%. Telah diikutsertakannya sebanyak 23 orang pejabat/staf baik dalam maupun keluar provinsi dalam rangka pelatihan serta Bimbingan Teknis yang diadakan oleh DPPKA, Kementerian Lingkungan Hidup serta Instansi terkait lainnya selama 12 bulan pada tahun 2019.

14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp49.011.210,00 atau sebesar 98,02%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Adapun rician kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran sebesar Rp 20.000.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 19.123.810,00 atau sebesar 95,62 %. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, yaitu tersedianya 4 (empat) jenis laporan yaitu :

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2018.
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2018.
- c. Laporan Keuangan Tahun 2018.
- d. Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik tiap bulan tahun 2019.

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran SKPD

Anggaran sebesar Rp 30.000.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 29.887.400,00 atau sebesar 99,62%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, yaitu tersedianya 8 (delapan) jenis laporan yaitu :

- a. Dokumen Perencanaan berupa Rencana Strategis Tahun 2016-2021 (revisi)
- b. Rencana Aksi Tahun 2019
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- d. Rencana Kerja Tahunan 2020
- e. RKA Tahun 2020
- f. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019
- g. RKA Perubahan Tahun 2019
- h. DPA Perubahan Tahun 2019

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariamanl Tahun 2016-2021.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan

perencanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun system musrenbang telah dikembangkan lebih baik dalam rangka memadukan perencanaan pembangunan namun belum optimal.

Melihat kondisi tersebut Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman selaku OPD yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai lembaga teknis di bidang lingkungan hidup mencoba untuk mensinergikan perencanaan pembangunan melalui :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai instansi pemerintah yang mengurus masalah lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, melakukan tugas utamanya dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan memastikan kondisi lingkungan hidup yang layak serta kondisi perumahan dan permukiman yang ideal dan administrasi pertanahan yang tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Indikator kinerja pelayanan tersebut terlihat pada indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terdiri dari:

- Indeks Kualitas Air

Kegiatan ini melakukan pemantauan terhadap kualitas air permukaan (sungai dan sumber mata air) yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Sungai yang dipantau adalah bagian hilir, tengah dan bagian hulu. Pemantauan ini berlaku untuk sungai yang tidak pendek. Contohnya Sungai Batang Limau, sungai Batang Kamumuan dan sungai Batang Ulakan. Sedangkan untuk ukuran sungai yang panjang dilakukan pemantauan pada 5 (lima) titik. Sungai yang dimaksud adalah sungai batang tapakis dan sungai Batang Naras. Sedangkan untuk sumber mata air (Lubuk Bonta, Tirta Alami dan Lubuk Cimantuang) sampel diambil pada 1 titik. Parameter yang diuji adalah pH, DO, TDS, DHL dan konduktivitas. Sedangkan untuk parameter logam, dilakukan pengujian di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan diharapkan adanya kepedulian masyarakat disekitar aliran sungai, sumber mata air dan meminimalisasi pencemaran lingkungan yang dihasilkan. Nilai Indeks Kualitas Air yang diperoleh pada tahun 2019 adalah 49,8.

- Indeks Kualitas Udara

Kegiatan ini melakukan pemantauan terhadap perusahaan yang dilakukan pembinaan adalah PT. Rimbo Paraduan di Kecamatan Batang Anai, PT. Jaya Sentrikon di Kecamatan Batang Anai, PT. Kunango Jantan di Kecamatan Batang Anai, PT. Usaha Inti Padang di Kecamatan Batang Anai, PT. Statika Mitra Sarana di Kecamatan 2x11 Kayutanam, PT. Sumatera Tropical Spices di Kecamatan Batang Anai, PT. Prizaco Gasindo & Transindo Putra Utama di Kecamatan Batang Anai, PT. Japfa Comfeed Indonesia di Kecamatan Batang Anai, PT. Anugrah Jaya Multiplikasi di Kecamatan Batang Anai, PT. Charoen Pokphand Jaya di Kecamatan Lubuk Alung, PT. Japfa Comfeed Indonesia Unit Farm 1 di Kecamatan 2x11 Kayutanam, PT. Japfa Comfeed Indonesia di Kecamatan Batang Anai. Hasil dari pengujian didapatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Padang Pariaman tahun 2019 sebesar 94,42.

- Persentase Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH

Pencapaian indikator yang telah diuraikan diatas didukung oleh Program dan kegiatan berikut:

- a. Program pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator di atas adalah:

- Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan ini mendukung upaya peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya memenuhi kaedah peduli lingkungan. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang LH, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada pelaku usaha/kegiatan sampai dimana kepatuhan/ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan usaha kegiatan yang dilakukannya. Dari sebanyak 40 usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan sepanjang tahun 2019, terdapat sebanyak 21 usaha/kegiatan yang taat administrasi dan teknis, 1 usaha/kegiatan yang taat teknis, 19 usaha/kegiatan yang tidak taat administrasi dan teknis.

- Pengkajian Dampak Lingkungan

Kegiatan ini sangat mendukung pencapaian indikator program karena indikator output dari kegiatan ini yaitu 1) Jumlah usulan dokumen lingkungan yang dikaji/dibahas, 2) Jumlah rekomendasi ijin lingkungan yang dikeluarkan/ditetapkan. Dari usulan dokumen yang dikaji dan rekomendasi yang dikeluarkan termuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh pelaku usaha/kegiatan yang mengajukan usaha/kegiatan pada tahun 2019. Ketentuan ini jika dilanggar dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang makan akan masuk ke ranah hukum sesuai UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dari 114 usulan yang dikaji, sebanyak 27 izin lingkungan yang dikeluarkan berupa Amdal dan UKL/UPL (atau setara) dan 87 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) diterbitkan sepanjang tahun 2019.

- Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tugas dan wewenang dari pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat. Sepanjang tahun 2019, terdapat

sebanyak 6 (enam) kasus/pengaduan masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti sesuai dengan Permen LH Nomor 09 tahun 2010.

b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator diatas adalah;

- Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup (Adiwiyata)

Kegiatan ini bertujuan mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang berdampak terhadap terciptanya lingkungan daerah bersih, hijau, dan lestari, sehingga dalam jangka panjang nantinya akan menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Kondisi yang diharapkan dari program ini yaitu penghargaan yang diterima baik pada tingkat provinsi maupun nasional. Adapun capaian pada program ini yaitu sebagai berikut:

- Sekolah Adiwiyata Kabupaten 9 (sembilan) sekolah
 - • Sekolah Adiwiyata Propinsi 6 (enam) sekolah
 - • Sekolah Adiwiyata Nasional diusulkan 7 (tujuh) sekolah
 - • Sekolah Adiwiyata Mandiri diusulkan 2 (dua) sekolah
- Rasio Rumah Layak Huni
Indikator kinerja sampai tahun 2019 ini terealisasi 0,175 dari target 0,175 pada akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2016-2021.
 - Luas Tanah Yang Menjadi Aset Pemda
Ukuran realisasi indikator kinerja 156,6 ha dari target 164,1 ha pada tahun 2019. Program yang mendukung capaian ini adalah;
 1. Program penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah
Kondisi yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pembebasan dan ganti rugi tanah dengan tolok ukur kinerja luas tanah yang dibebaskan/diganti rugi dengan target 156,63 ha dan realisasi 164,1 ha.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Indeks Kualitas Air	-	-	59,5	60	60,5	60,9	60,9	47,6	48,7	49,8	60,9	60,9	
2.	Indeks Kualitas Udara	-	-	86,3	87	87,5	87,5	89	97,83	97,83	94,42	87,5	89	
3.	Persentase ketaatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	-	-	37	46	48	51	55	37	53,5	52,5	51	55	
4.	Rasio rumah layak huni	-	-	0,174	0,175	0,175	0,175	0,175	0,174	0,175	0,175	0,175	0,175	
5.	Luas tanah yang menjadi asset pemda	-	-	155,63 Ha	156,6 Ha	156,6 Ha	157,6	159,8 Ha	155,63 Ha	161,59 Ha	169,09 Ha	158,6 Ha	159,8 Ha	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup dan dampak lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup dan dampak lingkungan. Agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor: 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 ;
 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Kawasan Pemukiman; dan
 3. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- f. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 1. Seksi Ganti Rugi;
 2. Seksi Sengketa Tanah; dan
 3. Seksi Administrasi Pertanahan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
- 2) perumusan kebijakan umum bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- 3) pengendalian pelaksanaan urusan lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
- 4) pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 5) pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- 6) pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- 7) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- 8) koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/ daerah di lingkungan Dinas;
- d. pengelolaan urusan ASN;

- e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- f. koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/ atau
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- b. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan asset Dinas;
- d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/ atau
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- e. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas.

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas;
- b. perumusan kebijakan teknis penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas;

- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penataan, penataan dan peningkatan kapasitas;
- e. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- f. pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- i. pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- l. pelaksanaan sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/keulauan dan ekoregion;
- m. pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan LH;
- n. pelaksanaan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- o. pelaksanaan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- p. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- q. pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- r. pelaksanaan pengesahan KLHS;
- s. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- t. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- u. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS;

- v. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- w. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- x. pelaksanaan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- y. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- z. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- aa. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- bb. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- cc. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

- dd. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- ee. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- ff. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- gg. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH);
- hh. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan IPPLH;
- ii. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan IPPLH;
- jj. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan IPPLH;
- kk. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);

- ll. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- mm. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- nn. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- oo. pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- pp. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- qq. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- rr. pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- ss. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- tt. pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan MHA;
- uu. pelaksanaan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- vv. pelaksanaan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ww. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- xx. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- yy. pelaksanaan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- zz. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aaa. pelaksanaan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- bbb. pelaksanaan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ccc. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ddd. pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- eee. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- fff. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ggg. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH;
- hhh. pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan LH;
- iii. pelaksanaan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- jjj. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- kkk. pelaksanaan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- lll. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- mmm. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas;
- nnn. pelaksanaan penyusunan pelaporan kinerja Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas; dan
- ooo. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja seksi;

- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- d. pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- g. pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- j. pelaksanaan sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/keulauan dan ekoregion;
- k. pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan LH;
- l. pelaksanaan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- m. pelaksanaan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- n. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- o. pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- p. pelaksanaan pengesahan KLHS;
- q. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- r. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS;

- t. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- u. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- v. pelaksanaan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- w. pelaksanaan proses izin lingkungan.

b. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengaduan dan penegakan hukum.

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pengaduan dan penegakan hukum.
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- f. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- h. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- i. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- j. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai

dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH);

- k. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan IPPLH;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan IPPLH;
- m. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan IPPLH;
- n. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
- o. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- p. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- q. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- r. pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

c. Seksi Peningkatan Kapasitas

Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kapasitas.

Seksi Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi peningkatan kapasitas;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- b. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;

- c. pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- d. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan MHA;
- f. pelaksanaan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. pelaksanaan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. pelaksanaan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. pelaksanaan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o. pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH;
- s. pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. pelaksanaan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

- v. pelaksanaan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- w. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pengendalian pencemaran;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
- e. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- f. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- g. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- h. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
- i. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- j. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- k. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- l. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- m. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;

- n. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- o. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- p. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- q. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- r. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- s. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- t. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- u. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- v. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- w. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- x. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- y. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- z. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- aa. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- bb. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
- cc. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;

- dd. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- ee. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- ff. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
- gg. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3;
- hh. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ii. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- jj. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- kk. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ll. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- mm. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- nn. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- oo. penentuan baku mutu lingkungan;
- pp. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- qq. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- rr. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- ss. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- tt. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- uu. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

- vv. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- ww. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- xx. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- yy. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- zz. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- aaa. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- bbb. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- ccc. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- ddd. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- eee. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- fff. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- ggg. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- hhh. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- iii. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan sampah dan limbah b3.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- c. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- d. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

- e. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- f. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
- g. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- h. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- i. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- j. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- k. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- l. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- m. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- n. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- o. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- p. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- q. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- r. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- s. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- t. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- u. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- w. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- x. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

- sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- y. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - z. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
 - aa. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
 - bb. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - cc. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - dd. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
 - ee. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3;
 - ff. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 - gg. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

b. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- g. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- h. penentuan baku mutu lingkungan;
- i. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- l. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- m. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- n. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- q. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- d. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- f. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

- g. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- h. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- i. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- k. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- l. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- m. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

5. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Seksi Perumahan

Seksi Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Perumahan.

Seksi Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perencanaan teknis Perumahan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang Perumahan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Perumahan;
- d. pelaksanaan pendataan dan perencanaan dan pengembangan system pembiayaan bidang perumahan
- e. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan perumahan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Perumahan;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Seksi Kawasan Permukiman

Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Kawasan Permukiman.

Seksi Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kawasan Permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan teknis tata ruang;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Kawasan Permukiman;
- d. melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- e. melaksanakan teknis kegiatan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. melaksanakan teknis kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- g. melaksanakan teknis kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang kawasan permukiman;

- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
- d. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU Perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU, penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan di lingkup Kabupaten);
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

6. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang ganti kerugian dan santunan tanah, sengketa tanah, penetapan tanah ulayat dan administrasi pertanahan.

Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program bidang pertanahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan bidang ganti kerugian dan santunan tanah, sengketa tanah, penetapan tanah ulayat dan administrasi pertanahan;
- e. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten.
- f. penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* dalam Daerah Kabupaten.
- g. penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten;
- h. penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- i. pelaksanaan layanan pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- j. penyiapan bahan penerbitan Izin Membuka Tanah;
- k. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- l. penyiapan rumusan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten
- m. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ganti kerugian dan santunan tanah, sengketa tanah, penetapan tanah ulayat dan administrasi pertanahan
- n. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Seksi Ganti Rugi

Seksi Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan ganti kerugian dan santunan tanah.

Seksi Ganti Rugi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan ganti rugi tanah;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang ganti rugi tanah;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan ganti rugi tanah;
- d. pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten;
- e. penyiapan bahan penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang ganti rugi tanah;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Seksi Sengketa Tanah

Seksi Sengketa Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan dan tanah kosong di lingkup kabupaten.

Seksi Sengketa Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan penyelesaian sengketa tanah;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penyelesaian sengketa tanah;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah;
- d. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten;
- e. pelaksanaan penyelesaian Masalah Tanah Kosong dalam Daerah

Kabupaten.

- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penyelesaian sengketa tanah;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Seksi Administrasi Pertanahan

Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan layanan izin lokasi dan penerbitan izin membuka tanah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta perencanaan penggunaan tanah dalam lingkup kabupaten.

Seksi Administrasi Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelaksanaan administrasi pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi pertanahan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan administrasi pertanahan;
- d. pelaksanaan layanan pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- e. penyiapan bahan penerbitan Izin Membuka Tanah;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- g. penyiapan rumusan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penyelesaian sengketa tanah;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dibutuhkan yaitu :

1. Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)
2. Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PLHD)
3. PPNS

Sedangkan yang ada saat ini Jabatan fungsional Pedal sebanyak 1 orang.

Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki struktur dan jabatan DLHPKPP menurut eselonering, sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

STRUKTUR JABATAN DLHPKPP MENURUT ESSELONERING

NO	NAMA JABATAN	ESSELONERING			STAF
		ESELON II	ESELON III	ESSELON IV	
1	Kepala	V			
2	Sekretaris		V		
3	Kabid Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas		V		
4.	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limabah B3		V		
5.	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman		V		
6.	Kabid Pertanahan		V		
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian			V	
8.	Kasubag Perencanaan			V	
9.	Kasubag Keuangan			V	
10	Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan			V	
11.	Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum			V	
12.	Seksi Peningkatan Kapasitas			V	
13.	Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3			V	
14.	Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			V	
15.	Seksi Pemeliharaan Lingkungan			V	
16	Seksi Perumahan			V	
17	Seksi Kawasan Permukiman			-	

18	Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)			-	
19	Seksi Ganti Rugi			V	
20	Seksi Sengketa Tanah			V	
21	Seksi Administrasi Pertanahan			V	
22	UPTD (2 Orang)			-	
23	Staf PNS				23
	Jumlah	43 orang			

Sumber : DUK Dinas LHPKPP 2019

Adapun komposisi PNS di Lingkungan Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

KOMPOSISI PNS DINAS LHPKPP KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata 2	5	3	7
2	Strata 1	12	11	20
3	D.III	1	1	3
4.	SLTA	6	2	10
5.	SMP	1	-	1
6.	SD	1	-	1
	Total	26	17	42

Sumber : DUK Dinas LHPKPP 2019

Ditinjau dari golongannya, komposisi PNS di lingkungan Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman adalah :

KOMPOSISI DINAS LHPKPP PNS KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2019

No.	Golongan	Jumlah
1	Gol IV	7
2	Gol III	25
3	Gol II	9
4	Gol I	2
	Jumlah	43 orang

Sumber : DUK Dinas LHPKPP 2019

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Masih kurangnya sumberdaya manusia baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2. Struktur organisasi kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan terutama pada subag Perencanaan dan Evapor dibandingkan dengan subag Perencanaan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/Kota lainnya yang hanya melaksanakan penyusunan program, sedangkan Subag Perencanaan dan Evapor melaksanakan penyusunan program dan evaluasi program.
3. Adanya keterlambatan regulasi baik tingkat pusat maupun propinsi maupun tingkat Kabupaten sehingga dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD yang sudah ditetapkan harus dirubah didalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru.
4. Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan barang/Jasa masih sedikit.
5. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menunjang proses perencanaan.
6. Belum adanya kesepahaman antara pemangku kepentingan untuk mengutamakan hasil Musrenbang yang sudah dilaksanakan.
7. Hasil musrenbang masih didominasi oleh pembangunan fisik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD (Renstra OPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD (Renja OPD), OPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 disusun dengan mempedomani 1) RPJPN tahun 2005-2025, 2) RPJMN tahun 2020-2024, 3) RPJPD Propinsi Sumatera Barat 2005-2025, 4) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025, 5) RPJMD Kabupaten

Padang Pariaman tahun 2016-2021, dan 6) Renstra Revisi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2016-2021. Hal ini untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja OPD yang dilaksanakan masing-masing OPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 merupakan rencana kerja akan disusun untuk dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) tahun 2016-2021, Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Padang Pariaman dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 ditetapkan tolak ukur kinerja melalui indikator makro, indikator ekonomi dan sosial.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Hasil Musrenbang Untuk Usulan Tahun 2021 Kabupaten Padang Pariaman

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Balai Jumaik / Balah Aie Utara / VII Koto	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan	3 unit	Sesuai Tupoksi yang ada pada DLHPKPP
2.	Perbaikan rumah tidak layak huni	Nagari Guguk, Kayu Tanam, Kapalo Hilalang, Anduring/Padang Lapai, Bandar Manggis, Pasa	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan	10 Unit	Sesuai Tupoksi yang ada pada DLHPKPP

		Limau, Rimbo Kalam, 2x11 Kayu Tanam			
3.	Pembangunan los pusaro Durian Jangek	Sungai Sirah Kuranji Hulu Kampung Kaciak, Sungai Geringging	Jumlah fasilitas pemakaman yang dibangun di kawasan permukiman	1 Unit	Sesuai Tupoksi yang ada pada DLHPKPP

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019, maka tema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai:

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional.
2. Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas.
3. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara
4. Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2014-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; (b) penyediaan infrastruktur wilayah; (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel berikut :

**Matrik Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang
Pariaman, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021**

No.	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis (Prioritas 9)	Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan (Prioritas 4)
		Pengembangan sumber daya baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur (Prioritas 6)	Peningkatan potensi wisata unggulan (Prioritas 5)
		Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam (Prioritas 10)	Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah (Prioritas 6)
		Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan (Prioritas 7)	
		Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi (Prioritas 8)	
		Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal (Prioritas 4)	
2	Mengembangkan wilayah untuk menguranfi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal (Prioritas 4)	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran (Prioritas 7)
		Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan (Prioritas 2)	
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Prioritas 3)	
		Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan	

		nasional dan pengembangan agribisnis (Prioritas 9)	
3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Prioritas 3)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Prioritas 2)
		Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan (Prioritas 2)	
		Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal (Prioritas 4)	
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat (Prioritas 1)	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya (Prioritas 1)
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengembangan sumber daya baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur (Prioritas 6)	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang (Prioritas 3)
		Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan (Prioritas 5)	
		Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan (Prioritas 2)	
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Prioritas 3)	
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam (Prioritas 10)	Pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana (Prioritas 9)
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan (Prioritas 5)	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah (Prioritas 8)

**Matrik Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMN 2020-2024 dengan
Visi Misi RPJMD Padang Pariaman Tahun 2016-2021**

VISI RPJMN TAHUN 2020-2024		Visi RPMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021	
<i>Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong</i>		<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>	
MISI RPJMN TAHUN 2020-2024		MISI RPJPD TAHUN 2005-2025	
1	Peningkatan kualitas manusia Indonesia	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasis nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan.	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Penegakan system hokum yang bebas koorupsi, bermartabat dan terpercaya.	6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.		
8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.		
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan		

Peran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dapat pula digambarkan dalam bagan di bawah ini :



3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 tidak lepas dari tema RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 yakni **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan SDM Berkualitas”**.

Sedangkan untuk penyusunan perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup dan dampak lingkungan tahun 2021 karena tahun 2021 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD (Tahun 2016-2021) sesuai dengan pentahapan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, jadi untuk menyusun perencanaan kita mengacu pada Pepres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Untuk itu sejalan dengan itu sebagaimana yang dituangkan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 maka prioritas pembangunan adalah:

1. *Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya* dengan arah kebijakan melalui optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Agama.

2. *Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat*
3. *Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang*
4. *Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan.*
5. *Peningkatan potensi pariwisata unggulan.*
6. *Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah.*
7. *Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.*
8. *Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah.*
9. *Penanggulangan resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.*

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk menyusun perencanaan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 sesuai dengan prioritas yang keenam yaitu *Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan berbasis tata ruang* maka tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
Terwujudnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Pengendalian dampak lingkungan hidup	% Timbulan sampah dikelola	58,33%
	Indeks Kualitas Udara	Meningkatkan PAD pelayanan laboratorium lingkungan	Luas RTH	31601.8 Ha
		Pemulihan dampak lingkungan hidup	Luas tutupan Vegetasi	31600 Ha
		Peningkatan kapasitas SDM terhadap pengelolaan LH	Jumlah Stakeholder Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Lembaga yang Berperan Aktif dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup	2 Stakeholder
	Evaluasi dampak		Indeks kualitas air	60,9

		Lingkungan Hidup	(IKU)	
		Peningkatan kapasitas SDM terhadap pengelolaan LH	Indeks kualitas udara (IKU)	89
Terwujudnya kualitas pengawasan terhadap kerusakan LH	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan hukum lingkungan hidup	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH (IKU)	55 %
Terwujudnya kualitas infrastruktur permukiman	Luas kawasan kumuh	Meningkatkan akses informasi perumahan dan infrastruktur permukiman	Jumlah dokumen data base perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman	0 Dok
		Meningkatkan penanganan kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh	316,26 Ha
Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui peningkatan kepemilikan rumah bagi MBR	Rasio Rumah layak huni	Meningkatkan kepemilikan rumah bagi MBR	Rasio rumah layak huni	0,175
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penataan dan penyelesaian urusan pertanahan	Luas tanah yang menjadi asset pemda	Meningkatnya penataan tanah sebagai aset pemda	Luas tanah yang menjadi aset pemda	159,8 Ha
		meningkatnya pelayanan penyelesaian masalah tanah	% pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Menambah sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- 2) Memperluas wilayah operasional truk sampah.
- 3) Membangun pabrik pengolahan sampah.
- 4) Mengaktifkan laboratorium lingkungan.
- 5) Menambah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan.
- 6) Meningkatkan akreditasi laboratorium lingkungan.

- 7) Mengoptimalkan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan inventarisasi data dan informasi SDA.
- 8) Mengoptimalkan pengelolaan sampah.
- 9) Meningkatkan luas RTH.
- 10) Meningkatkan perlindungan rehabilitasi SDA.
- 11) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA.
- 12) Meningkatkan konservasi daerah tangkapan dan sumber air.
- 13) Membangun turap hidup dan batu bronjong di sempadan sungai.
- 14) Meningkatkan pengelolaan lingkungan pertambangan.
- 15) Melakukan pemulihan pasca tambang.
- 16) Meningkatkan peran serta sekolah adiwiyata.
- 17) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kelompok proklim.
- 18) Meningkatkan peran serta pelaku usaha dalam kegiatan proper.
- 19) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kalpataru.
- 20) Meningkatkan peran serta Masyarakat Hukum Adat (MHA).
- 21) Mengoptimalkan pengawasan dan pengujian sampel baku mutu air.
- 22) Meningkatkan pengawasan dan pengujian sampel baku mutu udara.
- 23) Meningkatkan kapasitas laboratorium lingkungan untuk uji mutu air dan mutu udara.
- 24) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.
- 25) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hukum lingkungan.
- 26) Melaksanakan penyuluhan lingkungan hidup.
- 27) Memberikan rekomendasi izin lingkungan.
- 28) Menyusun database perumahan.
- 29) Menyusun database infrastruktur kawasan permukiman.
- 30) Menyusun database perumahan pengembang.
- 31) Menyusun database kawasan kumuh.
- 32) Melaksanakan peningkatan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH).
- 33) Menyediakan akses jalan di perumahan dan kawasan permukiman.
- 34) Menyediakan fasilitas pemakaman di kawasan permukiman.

- 35) Menyediakan drainase di perumahan dan kawasan permukiman.
- 36) Membangun taman dan RTH di kawasan permukiman.
- 37) Melaksanakan pengadaan tanah menjadi asset pemda.
- 38) Melaksanakan sertifikasi tanah pemda.
- 39) Melaksanakan pengadministrasian pertanahan.
- 40) Melaksanakan sosialisasi hukum pertanahan.
- 41) Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun Anggaran 2021 akan melaksanakan program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9. Program Pengelolaan Persampahan
10. Program Pengembangan Perumahan
11. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh
12. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
13. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
14. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
15. Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
16. Program Penatagunaan Tanah

Sesuai dengan penerapan Permendagri 90 Tahun 2019, maka dilakukan pemetaan dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2004, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut:

					BELANJA LANGSUNG								
2	0	0	0		Program Pelayanan Adminsitration Perkantoran	persentase peningkatan ketertiban adm kantor	DLHPKP P	50%	798,916,790	APB D	Penting dilaksanakan	50%	878,808,469
2	0	0	0	0	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang ditindak lanjuti selama satu tahun	DLHPKP P	1500 surat	36,300,000	APB D		1500 surat	39,930,000
2	0	0	0	0	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik	DLHPKP P	12 bln	71,816,790	APB D		12 bln	78,998,469
2	0	0	0	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan yang terlaksana selama satu tahun	DLHPKP P dan laboratorium Lingkungan	30 org	298,000,000	APB D		30 org	327,800,000
2	0	0	0	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan	DLHPKP P dan laborato	12 bln	78,000,000	APB D		12 bln	85,800,000

						kantor	rium Lingkung an						
2	0	0	0	1	Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga kantor	DLHPKP P	0	-	APB D		0	-
2	0	0	0	1	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan Buku Undang-undang yang disediakan selama satu tahun	DLHPKP P	5 jenis	10,000,00 0	APB D		5 jenis	11,000,00 0
2	0	0	0	1	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	DLHPKP P	12 bln	20,000,00 0	APB D		12 bln	22,000,00 0
2	0	0	0	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang difasilitasi	DLHPKP P	12 bln	220,000,0 00	APB D		12 bln	242,000,0 00

2	0	0	0	1	Jasa Pendukung Tenaga Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa pendukung tenaga administrasi perkantoran	DLHPKP P	12 bln	64,800,00 0	APB D		12 bln	71,280,00 0
2	0	0	0		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase penyediaan Sapran dalam mendukung kegiatan kantor	DLHPKP P	70%	344,200,000	APB D	Penting dilaksan akan	70%	378,620,000
2	0	0	0	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	DLHPKP P	1 paket	175,000,000	APB D		1 paket	192,500,000
2	0	0	0	2	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DLHPKP P	12 bln	25,000,000	APB D		12 bln	27,500,000
2	0	0	0	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	DLHPKP P	4 unit	137,200,000	APB D		4 unit	150,920,000

2	0	0	0	2	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DLHPKP P	12 bln	7,000,000	APB D		12 bln	7,700,000
2	0	0	0		Program peningkatan disiplin aparatur	persentase peningkatan kualitas kinerja aparatur	DLHPKP P	85%	62,500,000	APB D	Penting dilaksanakan	85%	68,750,000
2	0	0	0	4	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paket penyediaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DLHPKP P	62 paket	62,500,000	APB D		62 paket	68,750,000
2	0	0	0		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persentase aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan	DLHPKP P	50%	40,000,000	APB D	Penting dilaksanakan	50%	44,000,000
2	0	0	0	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti bimbingan teknis	DLHPKP P	20 orang	40,000,000	APB D		20 orang	44,000,000

2	0	0	0		Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase penyusunan rencana kerja tepat waktu sesuai ketentuan	DLHPKP P	90%	112,500,000	APB D	Penting dilaksanakan	90%	123,750,000
2	0	0	0	0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD (Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja per Bulan) yang disusun	DLHPKP P	4 laporan	30,000,000	APB D		4 laporan	33,000,000

2	0	0	0	0	Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran SKPD	Jumlah rencana kerja (Renja, RKT, Renstra) Perjanjian Kinerja (PK), dokumen anggaran (RKA dan DPA awal, RKA da DPA Perubahan) yang disusun.	DLHPKP P	8 Dokum en	82,500,000	APB D		8 Dokumen	90,750,00 0
2	0	0	1		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	indeks kualitas air (IKU)	Kab. Padang Pariaman	60,9	984,600,000	APB D	Penting dilaksanakan	60,9	1,030,260,000
2	0	0	1	2	Pengujian Limbah Cair & Ijin Instalasi Pengelolaan Limbah Cair (IPLC)	Jumlah titik uji baku mutu air limbah usaha/kegiatan (DAS dekat perusahaan)		14 titik	30,000,000	APB D		16 titik	33,000,000

						Jumlah usaha/kegiatan yang taat secara teknis baku mutu air limbahnya		9 usaha	0	APB D		8 usaha	-
						Jumlah ijin IPLC yang ditetapkan		14 buah	0	APB D		2 buah	-
2	0	0	1	2	Pengawasan dan Penerbitan Ijin LB3	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi sebagai menghasilkan LB3		24 usaha	30,000,000	APB D		24 usaha	33,000,000
						Jumlah usaha/kegiatan yang mengurus ijin TPS LB3		3 usaha	0	APB D		3 usaha	-
2	0	0	1	1	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah sungai yang dipantau		11 sungai	55,000,000	APB D		11 sungai	60,500,000
						Jumlah sumber mata air yg dipantau		3 buah	0	APB D		3 buah	-
						Jumlah pantai yang dipantau		2 buah	0	APB D		2 buah	-

					Pengadaan Peralatan laboratorium	Jumlah alat laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri yang diadakan	1 paket	-	APB D		1 paket	-
					Penyediaan jasa sumberdaya listrik gedung laboratorium	Jumlah bulan penyediaan jasa sumberdaya listrik laboratorium	12 bulan	48,000,000	APB D			
					Perda pengelolaan Laboratorium lingkungan	Tersedianya perda Laboratorium lingkungan	0	-	APB D		0	-
					Perbup pemungutan retribusi pelayanan laboratorium lingkungan	Jumlah Perbup pemungutan retribusi pelayanan laboratorium lingkungan yang disusun	0	-	APB D		0	-
2	0	0	1	2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung laboratorium	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan	12 bulan	50,000,000	APB D		12 bulan	55,000,000

						gedung laboratorium						
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung laboratorium	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung laboratorium	12 bulan	15,000,000	APB D		12 bulan	16,500,000
2	0	0	1	3	Operasional laboratorium	Jumlah bulan pelaksanaan operasional laboratorium	12 bulan	115,000,000	APB D		12 bulan	126,500,000
					Peningkatan kapasitas pengelolaan laboratorium lingkungan	Jumlah bulan pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelolaan laboratorium lingkungan	1 paket	296,600,000	APB D		1 paket	326,260,000
					Pelatihan Petugas laboratorium lingkungan	Jumlah petugas yang dikirim mengikuti pelatihan	3 orang	-	APB D		3 orang	-

						Persentase Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH (IKU)	Kab. Padang Pariaman	55%	345,000,000	APB D	Penting dilaksanakan	55%	379,500,000
2	0	0	1	0	0	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup		50 usaha	100,000,000	APB D		50 usaha	110,000,000
						Jumlah usaha/kegiatan yang taat adm		8 usaha	0	APB D		8 usaha	-
2	0	0	1	0	0	Pengkajian dampak lingkungan		50 dok	60,000,000	APB D		50 dok	66,000,000
						% rekomendasi/ ijin lingkungan yang ditetapkan/ditebitkan		90%	0	APB D		90%	-

					Penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun		1 dok		APB D		1 dok	-
2	0	0	1	1	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang di susun		1 dok	150,000,000	APB D		1 dok	165,000,000
					Penentuan daya dukung dan daya tampung LH	Jumlah DDDTLH yang disusun		1 dok				1 dok	-

2	0	0	1	2	Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pencemaran dan Perusakan LH	Jumlah Pengaduan Masyarakat Mengenai pencemaran dan Perusakan LH yang ditindaklanjuti	5 kasus	35,000,000	APB D		5 kasus	38,500,000
						% tindak lanjut pengaduan masyarakat karena dugaan adanya pencemaran lingkungan	100%	0	APB D		100%	-
					Sosialisasi tata cara pengaduan mengenai pencemaran dan perusakan LH	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tata cara pengaduan mengenai pencemaran dan perusakan LH	103 orang	-	APB D		103 orang	-

					Sosialisasi Kebijakan LH	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijakan LH		103 Orang	-	APB D		103 Orang	-
2	0	0	1		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah dikelola	Kab. Padang Pariaman	54,44%	1,812,500,000	APB D	Penting dilaksanakan	54,44%	1,993,750,000
2	0	0	1	0	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah timbulan sampah yang dapat dikelola dalam 1 tahun di Kab. Padang Pariaman		32.000 ton	850,000,000	APB D		32.000 ton	935,000,000
						Jumlah kecamatan wilayah operasi truk sampah		17 kec	0	APB D		17 kec	-
2	0	0	1	1	Gerakan Sumbar Bersih (GSB)	Jumlah calon kecamatan yang dibina		2 kec	55,000,000	APB D		2 kec	60,500,000

						Jumlah kec yang mewakili untuk dinilai oleh Provinsi		1 kec	0	APB D		1 kec	-
					Pembangunan Bank Sampah	Jumlah bank sampah yang dibangun	Enam Lingkungan	1 paket	0	APB D		1 paket	-
2	0	0	1	2	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Jumlah paket penyediaan sarana dan prasarana persampahan		1 paket	850,000,00	DAK		1 paket	935,000,00
					Pengadaan tong sampah perumahan dan pertokoan	Jumlah tong sampah perumahan dan pertokoan yang disediakan		10 Paket	0	APB D		2 Paket	-
					Pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	Jumlah TPA yang dibenahi		1 buah	57,500,00	APB D		1 buah	63,250,00
					Revisi Ranperda Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen ranperda pengelolaan sampah yang disusun		1 buah	0	APB D		1 buah	-

				FS dan DED Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah	jumlah dokumen FES dan DED yang diterbitkan				APB D			
				AMDAL Pabrik Pengolahan Sampah	jumlah dokumen AMDAL yang diterbitkan				APB D			
				Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah	Jumlah pabrik pengolahan sampah yang dibangun				APB D			
				Fasilitas Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah	Terfasilitasinya pembangunan pabrik pengolahan sampah				APB D			
				Pembangunan Pabrik Mini Pengolahan Sampah di Nagari	jumlah pabrik mini pengolahan sampah yang dibangun di Korong dan Nagari				APB D			

					Pengolahan sampah organik dan an organik	terlaksananya pemisahan sampah organik dan an organik			0	APB D			-
					Sosialisasi Gerakan 3 R	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi gerakan 3R		103 orang		APB D		103 orang	-
2	0	0	1	8	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Luas tutupan vegetasi	Kab. Padang Pariaman	31599.8 ha	25,000,000	APB D	Penting dilaksanakan	31599.8 ha	0
2	0	0	1	0	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Pembinaan terhadap kelompok masyarakat peduli lingkungan		50 orang	0	APB D		50 orang	-
2	0	0	1	0	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-	Penambahan luas Kawasan/Daerah Tangkapan Air		10 ha	0	APB D		10 ha	-

					Sumber Air	(Rehabilitasi)							
2	0	0	1	1	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	Pemetaan Sosial untuk pemulihan lahan akses terbuka	0	0	APB D		0	-	
					Pemulihan Akses Lahan Terbuka (Reklamasi Pasca Tambang)	Luas reklamasi pasca tambang	0	25,000,000	APB D		0	-	
					Fasilitasi pembangunan tempat wisata pada lahan bekas tambang	terfasilitasinya pembangunan tempat wisata pada lahan bekas tambang	0	-	APB D		0	-	
					Pembangunan Turap Hidup	jumlah turap hidup yang ditanami	20.000 batang	0	APB D		20.000 batang	-	
					Pembangunan batu bronjong di sempadan sungai	Jumlah pembangunan batu bronjong yang dilaksanakan	1 paket	-	APB D		1 paket	-	

2	0	0	2		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	indeks kualitas udara (IKU)	Kab. Padang Pariaman	89	33,000,000	APB D	Penting dilaksanakan	89	36,300,000
2	0	0	2	0	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	persentase pelaku usaha/kegiatan yang mentaati ketentuan baku mutu udara/emisi		13%	33,000,000	APB D		13%	36,300,000
						Jumlah perusahaan yang dipantau uji kualitas emisi sumber tidak bergerak		8 perusahaan	0	APB D		8 perusahaan	-
						Jumlah perusahaan yang taat adm dan teknis emisi gas buang sumber tidak bergerak		8 perusahaan	0	APB D		8 perusahaan	-

						jumlah lokasi usaha/kegiatan yang diuji kualitas udara ambien		49 usaha	0	APB D		49 usaha	-
2	0	0	2		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang terbuka hijau	Kab. Padang Pariaman	31600.8 ha	830,000,000	APB D	Penting dilaksanakan	31600.8 ha	913,000,000
2	0	0	2	0	Pemeliharaan RTH	Luas taman yang dipelihara di Kab. Padang Pariaman		35 ha	80,000,000	APB D		35 ha	88,000,000
						Jumlah tanaman yang disisip dan diganti pada Taman Kehati di IKK		4.000 batang		APB D		4.000 batang	
2	0	0	2	1	Pemeliharaan median dan Kebersihan taman	Panjang taman yang dipelihara di median jalan Kabupaten		10 km, 50 org	750,000,000	APB D		10 km, 50 org	825,000,000

					Pembuatan dan Pengembangan Taman	Jumlah taman yang dibangun di perkantoran dan ruang publik		1 paket	0	APB D		1 paket	-
					Peningkatan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati)	Jumlah kegiatan peningkatan pembangunan tanaman kehati		1 Kegiatan	0	APB D		1 Kegiatan	-
2	0	0	2	6	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kualitas Akses Informasi Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan jumlah stakeholder masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam penyelamatan LH	Kab. Padang Pariaman	4	260,000,000	APB D	Penting dilaksanakan	4	286,000,000
2	0	0	2	0	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah calon sekolah yang dibina program Adiwiyata		50 sekolah	150,000,000	APB D		50 sekolah	165,000,000

						Sekolah penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata pada Tingkat Kab/Prov/Nas/Mandiri;			0	APB D			-
						- SD		31 sekolah	0	APB D		31 sekolah	-
						- SLTP		15 sekolah	0	APB D		15 sekolah	-
						- SLTA		4 sekolah	0	APB D		4 sekolah	-
2	0	0	2	0	Pengembangan data dan informasi lingkungan (IKPLHD)	Jumlah buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kab. Padang Pariaman		2 buku	0	APB D		2 buku	-

						Akurasi informasi dan data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah		86%	0	APB D		86%	-
2	0	0	2	0	Program Kampung Iklim (proklim)	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		5 kelompok	110,000,000	APB D		5 kelompok	121,000,000
						jumlah kelompok yang mendapat penghargaan tingkat nasional		1 kelompok	0	APB D		1 kelompok	-
					Kalpataru	jumlah masyarakat yang diverifikasi, suport dan binaan dalam pengabdian, penyelamatan,		2 orang	0	APB D		2 orang	-

					dan pelindungan terhadap lingkungan hidup							
					jumlah masyarakat (klp/individu) yang mendapat penghargaan kalpataru		0		APB D		0	
				Pembinaan Proper	jumlah perusahaan yang memperoleh penghargaan Proper		4 perusah aan	0	APB D		4 perusahaan	-
				Pelaksanaan penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah penyuluhan LH yang dilaksanakan		1 kali	0	APB D		1 kali	-

				Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH	Jumlah instruktur dan penyuluh LH yang diberikan bimtek LH		1 Orang	0	APB D		1 Orang	-
				Sosialisasi kebijakan keberadaan MHA	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi		103 orang	0	APB D		103 orang	-
				Identifikasi, verifikasi dan penetapan pengakuan keberadaan MHA	Jumlah MHA yang teridentifikasi, terverifikasi dan ditetapkan		50 Kelompok	0	APB D		50 Kelompok	-
				Pembinaan MHA	Jumlah MHA yang dibina		50 Kelompok	0	APB D		50 Kelompok	-
				Program Perencanaan Tata Ruang				300,000,000				
				Penyusunan KLHS	Jumlah dokumen KLHS yang disusun		1 Dokumen	300,000,000	APB D			
2	0	0	1	Program Lingkungan Sehat	Luas kawasan kumuh	Kab. Padang Pariama	2.815,48 ha	725,000,000	APB D	Penting dilaksanakan	2.815,48 ha	165,000,000

						n					
				Perumahan dan permukiman							
				Database Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Tersedianya Dokumen Database Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	0	-	APB D		0	-
					Jumlah kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang teridentifikasi	0	0	APB D		0	-
					Akurasi data/informasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	0	0	APB D		0	-
					Penetapan SK kawasan kumuh	1 dok	0	APB D		1 dok	-

				DED kawasan kumuh	Tersedianya dokumen DED kawasan kumuh		1 dok	150,000,000	APB D		1 dok	165,000,000
				Penyusunan RP2KPKP	Jumlah dokumen RP2KPKP yang di susun		0	400,000,000			0	
					Jumlah dokumen laporan yang disusun		0		APB D		0	
				Penyusunan ranperda kawasan kumuh	Jumlah ranperda kawasan kumuh yang disusun		1	50,000,000				
				Penanganan kawasan kumuh	berkurangnya luasan kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Sesuai DED yang telah disusun	10 ha		APB D		10 ha	-

					Pembangunan MCK Plus-plus	jumlah MCK plus-plus yang dibangun	Tersebar di Seluruh Kec	1 Unit		APB D		1 Unit	-
					Pembangunan IPAL Kumunal	Tersedianya IPAL Komunal di kawasan perumahan dan permukiman		0	0	APB D		0	-
					Fasilitasi BPS	Jumlah kegiatan BPS yang difasilitasi		1 Kegiatan	125,000,000				
2	0	0	2		Program pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP)	persentase Permukiman yang tertata	Kab. Padang Pariaman	28%	1,775,000,000	APB D	Penting dilaksanakan	28%	1,842,500,000

					Pembangunan, optimalisasi dan Pembangunan Jaringan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Tersedianya jaringan air minum yang dikelola oleh masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman		15 lokasi		APB D		15 lokasi	-
					Pembangunan sarana prasarana air bersih pedesaan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terpasang		500 sambungan		APB D		500 sambungan	-
2	0	0	2	0	Fasilitasi kegiatan PISEW	Terlaksananya fasilitasi kegiatan PISEW		12 bln		APB D		12 bln	-
					Sosialisasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah peserta (masyarakat perumahan dan kawasan permukiman) yang mengikuti sosialisasi		5 kali		APB D		5 kali	-

2	0	0	2	0	Data base prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan	Tersedianya Data base prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan		1 dok		APB D		1 dok	-
					DED Prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU) perumahan	Jumlah Dokumen DED PSU Perumahan		1 dok	100,000,000	APB D		1 dok	110,000,000
					Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Permukiman dan Perumahan	Tersedianya penerangan jalan umum (pju) dalam kawasan Permukiman dan perumahan		20 unit		APB D		20 unit	-
					Fasilitasi Pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di kawasan permukiman dan perumahan	terfasilitasinya pengadaan penerangan jalan umum di kawasan permukiman dan perumahan				APB D			

2	0	0	2	0	Pembangunan Drainase Permukiman	Jumlah drainase/gorong-gorong di kawasan perumahan dan Permukiman yang dibangun	Tersebar di Seluruh Kec	5 unit	500,000,00	APB D		4 unit	550,000,00
2	0	0	2	1	Fasilitasi pembangunan drainase permukiman	Terfasilitasinya pembangunan drainase di wilayah permukiman		1	25,000,00	APB D			27,500,00
2	0	0	2	1	Pembangunan Jalan Lingkung	Panjang jalan lingkung yang dibangun	Tersebar di Seluruh Kec	300 m	500,000,00	APB D		1000 m	550,000,00
2	0	0	2	1	Fasilitasi Pembangunan Jalan Lingkung	Terfasilitasinya pembangunan jalan lingkung		1	25,000,00				27,500,00

2	0	0	2	1	Pembangunan rabat beton jalan di perumahan	terbangunnya rabat beton jalan di perumahan		2 lokasi	500,000,00	APB D		2 lokasi	550,000,00
2	0	0	2	1	Fasilitasi pembangunan rabat beton jalan di perumahan	Terfasilitasinya pembangunan rabat beton jalan di perumahan		1	25,000,00	APB D		2 lokasi	27,500,00
					Pembangunan taman di kawasan permukiman	jumlah taman yang dibangun di permukiman		1 buah		APB D		1 buah	-
					Pembangunan RTH di kawasan Permukiman	Jumlah RTH yang dibangun di kawasan permukiman		1 buah		APB D		1 buah	-
					Pembangunan fasilitas pemakaman di kawasan perumahan	Jumlah fasilitas pemakaman yang dibangun di kawasan permukiman			100,000,00				

2	0	0	1		Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni (IKU)	Kab. Padang Pariaman	0.175	5,676,848,000	APB D	Penting dilaksanakan	0.175	2,167,000,000
					Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	Jumlah kegiatan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan		1	1,400,000,000	DAK			
					Fasilitasi Kegiatan Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang (Fasilitasi DAK Perumahan)	Jumlah kegiatan penunjang dan operasional penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh yang difasilitasi		1	156,848,000	DAK			

				Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang (DAK Perumahan)	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya yang dilaksanakan		1	1,925,000,000	DAK			
				Fasilitasi kegiatan Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang (Fasilitasi DAK Perumahan)					DAK			

				Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk upah tukang (DAK Perumahan)					DAK		
				Fasilitasi Kegiatan Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah					DAK		

				kabupaten/kota, termasuk upah tukang (Fasilitasi DAK Perumahan)							
				Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana	Jumlah unit pembangunan rumah bagi korban bencana			175,000,000	APB D		

				Fasilitasi Kegiatan Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, termasuk upah tukang (Fasilitasi DAK Perumahan)					DAK			
				Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, termasuk upah tukang (DAK Perumahan)					DAK			

				Fasilitasi Kegiatan Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, termasuk upah tukang (Fasilitasi DAK Perumahan)					DAK		
				Bantuan penyediaan rumah beserta PSU skala perumahan (DAK Perumahan)					DAK		
				Fasilitasi Kegiatan Bantuan penyediaan rumah beserta PSU skala perumahan (Fasilitasi DAK					DAK		

				Perumahan)							
				Fasilitiasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (DAK Perumahan)					DAK		-
				Fasilitiasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (fasilitasi DAK Perumahan)					DAK		-

2	0	0	1	1	Penunjang/pendukung Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah kegiatan Penunjang dan operasional pembangunan rumah MBR yang dilaksanakan		1 Kegiatan	400,000,00	APB D		1 Kegiatan	440,000,00
					Fasilitas pembangunan rusunawa	jumlah kegiatan pembangunan rusunawa yang difasilitasi		1 Kegiatan	60,000,00	APB D		1 Kegiatan	66,000,00
					Fasilitas pembangunan rumah khusus	jumlah kegiatan pembangunan rusus yang difasilitasi		1 Kegiatan	60,000,00	APB D		1 Kegiatan	66,000,00
					Fasilitas peningkatan kualitas rumah swadaya	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya yang difasilitasi		1 Kegiatan		APB D		1 Kegiatan	-

				Fasilitasi pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR oleh pengembang	Jumlah kegiatan pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR oleh pengembang yang difasilitasi		1 kegiatan		APB D		1 kegiatan	-
				Peningkatan RTLH menjadi RLH	Jumlah rumah yang ditingkatkan		25	1,450,000,000	APB D		80 unit	1,595,000,000
				Pendampingan Kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Terlaksananya pendampingan kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)				APB D			
				Data Base Perumahan By name by adress (BNBA)	Tersedianya dokumen data base perumahan By name by adress (BNBA)		0	-	APB D		0	-
					Jumlah rumah di Kab. Padang Pariaman			0	APB D			-

					Jumlah Rumah Layak Huni (RLH)			0	APB D				-
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)			0	APB D				-
					Jumlah bantuan terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)			0	APB D				-
				Penyusunan ranperda perumahan	Jumlah ranperda perumahan yang disusun		1	50,000,000					
				Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya review dokumen RP3KP		1	0	APB D		1		-

					Database perumahan pengembang	jumlah database perumahan pengembang yang disusun		0	-	APB D		0	-
2	0	0	1		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Luas Tanah yang menjadi Aset Pemda (IKU)	Kab. Padang Pariaman	158,6 ha	1,823,500,000	APB D	Penting dilaksanakan	158,6 ha	2,005,850,000
2	0	0	1	0	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	luas lahan yang dibebaskan		53603 m2	1,553,500,000	APB D		53603 m2	1,708,850,000
2	0	0	1	0	Inventarisasi dan Persertifikatan Tanah Pemda	jumlah sertifikat tanah aset pemda		4 sertifikat	150,000,000	APB D		4 sertifikat	165,000,000

					Fasilitasi administrasi penggunaan tanah pemda	Jumlah kegiatan administrasi penggunaan tanah pemda yang difasilitasi		1 Kegiatan	120,000,000	APB D		1 Kegiatan	132,000,000
2	0	0	1		Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	% pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Kab. Padang Pariaman	80%	380,000,000	APB D	Penting dilaksanakan	80%	418,000,000
2	0	0	1	0	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	% kasus/konflik pertanahan yang dapat diselesaikan oleh pemda		100 %	100,000,000	APB D		8 kasus	110,000,000
					Inventarisasi konflik pertanahan	Jumlah kasus/konflik pertanahan yang terjadi pada tahun direncanakan		8 kasus	80,000,000	APB D		80%	88,000,000

				Penyuluhan hukum pertanahan	Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan dimana tanahnya terkena pembangunan		75 orang		APB D		75 orang	-
				Fasilitasi kegiatan PTSL	Jumlah kegiatan PTSL yang difasilitasi		1 kegiatan		APB D		1 Kegiatan	-
				Fasilitasi kegiatan redistribusi lahan	Jumlah kegiatan redistribusi lahan yang difasilitasi		1 kegiatan	200,000,000	APB D		1 Kegiatan	220,000,000
				TOTAL				15,983,564,790				12,351,588,469

MATRIK PEMETAAN PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 KE PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Permendagri 13 Tahun 2006

Permendagri 90 Tahun 2019

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Program	Indikator Kinerja Program	Bidang Urusan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BELANJA											
BELANJA TIDAK LANGSUNG				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
BELANJA LANGSUNG											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase peningkatan ketertiban administrasi kantor	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang ditindak lanjuti selama satu tahun	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang ditindak lanjuti selama satu tahun	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan yang terlaksana selama satu tahun	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan yang terlaksana selama satu tahun	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga kantor	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga kantor	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan Buku Undang-undang yang disediakan selama satu tahun	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan Buku Undang-undang yang disediakan selama satu tahun	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang difasilitasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang difasilitasi	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Jasa Pendukung Tenaga Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa pendukung tenaga administrasi perkantoran		Jumlah bulan penyediaan jasa pendukung tenaga administrasi perkantoran						
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase penyediaan Sapran dalam mendukung kegiatan kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Program peningkatan disiplin aparatur	persentase peningkatan kualitas kinerja aparatur	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paket penyediaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paket penyediaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persentase aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti bimbingan teknis	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti bimbingan teknis	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase penyusunan rencana kerja tepat waktu sesuai ketentuan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD (Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja per Bulan) yang disusun	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD (Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja per Bulan) yang disusun	Administrasi Keuangan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran SKPD	Jumlah rencana kerja (Renja, RKT, Renstra) Perjanjian Kinerja (PK), dokumen anggaran (RKA dan DPA awal, RKA dan DPA Perubahan) yang disusun.	Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah	Jumlah rencana kerja (Renja, RKT, Renstra) Perjanjian Kinerja (PK), dokumen anggaran (RKA dan DPA awal, RKA dan DPA Perubahan) yang disusun.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	indeks kualitas air (IKU)	Pengujian Limbah Cair & Ijin Instalasi Pengelolaan Limbah Cair (IPLC)	Jumlah titik uji baku mutu air limbah usaha/kegiatan (DAS dekat perusahaan)	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah titik uji baku mutu air limbah usaha/kegiatan (DAS dekat perusahaan)	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			Jumlah usaha/kegiatan yang taat secara teknis baku mutu air limbahnya		Jumlah usaha/kegiatan yang taat secara teknis baku mutu air limbahnya						
			Jumlah ijin IPLC yang ditetapkan		Jumlah ijin IPLC yang ditetapkan						
		Pengawasan dan Penerbitan Ijin LB3	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi sebagai menghasilkan LB3	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi sebagai menghasilkan LB3	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			Jumlah usaha/kegiatan yang mengurus ijin TPS LB3		Jumlah usaha/kegiatan yang mengurus ijin TPS LB3						

		Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah sungai yang dipantau	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah sungai yang dipantau	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			Jumlah sumber mata air yg dipantau		Jumlah sumber mata air yg dipantau						
			Jumlah pantai yang dipantau		Jumlah pantai yang dipantau						
		Pengadaan Peralatan laboratorium	Jumlah alat laboratorium yang diadakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat laboratorium yang diadakan	Administrasi Umum		Program penunjang urusan pemerintahan daerah		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Penyediaan jasa sumberdaya listrik gedung laboratorium	Jumlah bulan penyediaan jasa sumberdaya listrik laboratorium	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa sumberdaya listrik laboratorium	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Perda pengelolaan Laboratorium lingkungan	Tersedianya perda Laboratorium lingkungan		Tersedianya perda Laboratorium lingkungan						
		Perbup pemungutan retribusi pelayanan laboratorium lingkungan	Jumlah Perbup pemungutan retribusi pelayanan laboratorium lingkungan yang disusun		Jumlah Perbup pemungutan retribusi pelayanan laboratorium lingkungan yang disusun						

		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung laboratorium	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung laboratorium	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung laboratorium	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung laboratorium	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung laboratorium	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung laboratorium	Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Operasional laboratorium	Jumlah bulan pelaksanaan operasional laboratorium	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah bulan pelaksanaan operasional laboratorium	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Peningkatan kapasitas pengelolaan laboratorium lingkungan	Jumlah bulan pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelolaan laboratorium lingkungan	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah bulan pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelolaan laboratorium lingkungan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Pelatihan Petugas laboratorium lingkungan	Jumlah petugas yang dikirim mengikuti pelatihan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah petugas yang dikirim mengikuti pelatihan	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH (IKU)	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin LH, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)..		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			Jumlah usaha/kegiatan yang taat adm		Jumlah usaha/kegiatan yang taat adm						
		Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah proses kajian dokumen lingkungan	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan atau izin PPLH	Jumlah proses kajian dokumen lingkungan	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)..		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	

			% rekomendasi/ ijin lingkungan yang ditetapkan/diterbitkan		% rekomendasi/ ijin lingkungan yang ditetapkan/diterbitkan						
		Penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Perencanaan Lingkungan Hidup.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang di susun	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	Jumlah dokumen Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang di susun	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Perencanaan Lingkungan Hidup.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Penentuan daya dukung dan daya tampung LH	Jumlah DDDTLH yang disusun	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah DDDTLH yang disusun	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pencemaran dan Perusakan LH	Jumlah Pengaduan Masyarakat Mengenai pencemaran dan Perusakan LH yang ditindaklanjuti	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH	Jumlah Pengaduan Masyarakat Mengenai pencemaran dan Perusakan LH yang ditindaklanjuti	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	

						Kabupaten/ Kota					
			% tindak lanjut pengaduan masyarakat karena dugaan adanya pencemaran lingkungan		% tindak lanjut pengaduan masyarakat karena dugaan adanya pencemaran lingkungan						
		Sosialisasi tata cara pengaduan mengenai pencemaran dan perusakan LH	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tata cara pengaduan mengenai pencemaran dan perusakan LH	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tata cara pengaduan mengenai pencemaran dan perusakan LH	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Sosialisasi Kebijakan LH	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijakan LH	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijakan LH	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah dikelola	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah timbulan sampah yang dapat dikelola dalam 1 tahun di Kab. Padang Pariaman	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah timbulan sampah yang dapat dikelola dalam 1 tahun di Kab. Padang Pariaman	Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			Jumlah kecamatan wilayah operasi truk sampah		Jumlah kecamatan wilayah operasi truk sampah						
		Gerakan Sumbar Bersih (GSB)	Jumlah calon kecamatan yang dibina	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah calon kecamatan yang dibina	Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			Jumlah kec yang mewakili untuk dinilai oleh Provinsi		Jumlah kec yang mewakili untuk dinilai oleh Provinsi						
		Pembangunan Bank Sampah	Jumlah bank sampah yang dibangun	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah bank sampah yang dibangun	Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	

		Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Jumlah paket penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah paket penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			- Tersedianya Mobil dump truck		- Tersedianya Mobil dump truck						
			- Tersedianya mobil sampah arm roll		- Tersedianya mobil sampah arm roll						
			- Tersedianya Bak Sampah Arm roll		- Tersedianya Bak Sampah Arm roll						
			- Tersedianya Becak Motor Sampah		- Tersedianya Becak Motor Sampah						
			- Tersedianya alat angkut gerobak sampah		- Tersedianya alat angkut gerobak sampah						
		Pengadaan tong sampah perumahan dan pertokoan	Jumlah tong sampah perumahan dan pertokoan yang disediakan	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah tong sampah perumahan dan pertokoan yang disediakan	Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	

		Pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	Jumlah TPA yang dibenahi	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPA yang dibenahi	Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Revisi Ranperda Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen ranperda pengelolaan sampah yang disusun	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/Kota	Jumlah dokumen ranperda pengelolaan sampah yang disusun	Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		FS dan DED Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah	jumlah dokumen FES dan DED yang diterbitkan		jumlah dokumen FES dan DED yang diterbitkan						
		AMDAL Pabrik Pengolahan Sampah	jumlah dokumen AMDAL yang diterbitkan		jumlah dokumen AMDAL yang diterbitkan						
		Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah	Jumlah pabrik pengolahan sampah yang dibangun		Jumlah pabrik pengolahan sampah yang dibangun						
		Fasilitasi Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah	Terfasilitasinya pembangunan pabrik pengolahan sampah		Terfasilitasinya pembangunan pabrik pengolahan sampah						

		Pembangunan Pabrik Mini Pengolahan Sampah di Nagari	jumlah pabrik mini pengolahan sampah yang dibangun di Korong dan Nagari	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	jumlah pabrik mini pengolahan sampah yang dibangun di Korong dan Nagari	Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Pengolahan sampah organik dan an organik	terlaksananya pemisahan sampah organik dan an organik	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	terlaksananya pemisahan sampah organik dan an organik	Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Sosialisasi Gerakan 3 R	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi gerakan 3R	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi gerakan 3R	Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Luas tutupan vegetasi	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Pembinaan terhadap kelompok masyarakat peduli lingkungan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Pembinaan terhadap kelompok masyarakat peduli lingkungan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat..		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Penambahan luas Kawasan/Daerah Tangkapan Air (Rehabilitasi)	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restrorasi	Penambahan luas Kawasan/Daerah Tangkapan Air (Rehabilitasi)	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	

						Kabupaten/ Kota		lingkungan hidup.			
		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	Pemetaan Sosial untuk pemulihan lahan akses terbuka	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Pemetaan Sosial untuk pemulihan lahan akses terbuka	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota		Program Pengendalia n Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.		Urusan Pemerinta han Bidang Lingkunga n Hidup	
		Pemulihan Akses Lahan Terbuka (Reklamasi Pasca Tambang)	Luas reklamasi pasca tambang	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Luas reklamasi pasca tambang	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota		Program Pengendalia n Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.		Urusan Pemerinta han Bidang Lingkunga n Hidup	
		Fasilitasi pembangunan tempat wisata pada lahan bekas tambang	terfasilitasinya pembangunan tempat wisata pada lahan bekas tambang	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	terfasilitasinya pembangunan tempat wisata pada lahan bekas tambang	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota		Program Pengendalia n Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.		Urusan Pemerinta han Bidang Lingkunga n Hidup	
		Pembangunan Turap Hidup	jumlah turap hidup yang ditanami	KEWENANGAN PU	jumlah turap hidup yang ditanami						
		Pembangunan batu bronjong di sempadan sungai	Jumlah pembangunan batu bronjong yang dilaksanakan	KEWENANGAN PU	Jumlah pembangunan batu bronjong yang dilaksanakan						

Program Peningkatan Pengendalian Polusi	indeks kualitas udara (IKU)	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	persentase pelaku usaha/kegiatan yang mentaati ketentuan baku mutu udara/emisi	Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	persentase pelaku usaha/kegiatan yang mentaati ketentuan baku mutu udara/emisi	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			Jumlah perusahaan yang dipantau uji kualitas emisi sumber tidak bergerak		Jumlah perusahaan yang dipantau uji kualitas emisi sumber tidak bergerak						
			Jumlah perusahaan yang taat adm dan teknis emisi gas buang sumber tidak bergerak		Jumlah perusahaan yang taat adm dan teknis emisi gas buang sumber tidak bergerak						
			jumlah lokasi usaha/kegiatan yang diuji kualitas udara ambien		jumlah lokasi usaha/kegiatan yang diuji kualitas udara ambien						
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang terbuka hijau	Pemeliharaan RTH	Luas taman yang dipelihara di Kab. Padang Pariaman	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Luas taman yang dipelihara di Kab. Padang Pariaman	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			Jumlah tanaman yang disisip dan diganti pada Taman Kehati di IKK		Jumlah tanaman yang disisip dan diganti pada Taman Kehati di IKK						

		Pemeliharaan median dan Kebersihan taman	Panjang taman yang dipelihara di median jalan Kabupaten	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Panjang taman yang dipelihara di median jalan Kabupaten	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Pembuatan dan Pengembangan Taman	Jumlah taman yang dibangun di perkantoran dan ruang publik	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Jumlah taman yang dibangun di perkantoran dan ruang publik	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Peningkatan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati)	Jumlah kegiatan peningkatan pembangunan tanaman kehati	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Jumlah kegiatan peningkatan pembangunan tanaman kehati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kualitas Akses Informasi Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan jumlah stakeholder masyarakat/keompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam penyelamatan LH	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah calon sekolah yang dibina program Adiwiyata	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/ dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan pengelolaan lingkungan	Jumlah calon sekolah yang dibina program Adiwiyata	Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			Sekolah penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata pada Tingkat Kab/Prov/Nas/Mandiri;		Sekolah penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata pada Tingkat Kab/Prov/Nas/Mandiri;						

			- SD		- SD						
			- SLTP		- SLTP						
			- SLTA		- SLTA						
		Pengembangan data dan informasi lingkungan (IKPLHD)	Jumlah buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kab. Padang Pariaman	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kab. Padang Pariaman	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			Akurasi informasi dan data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah		Akurasi informasi dan data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah						
		Program Kampung Iklim (proklam)	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/ dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan pengelolaan lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			jumlah kelompok yang mendapat penghargaan tingkat nasional		jumlah kelompok yang mendapat penghargaan tingkat nasional						

		Kalpataru	jumlah masyarakat yang diverifikasi, suport dan binaan dalam pengabdian, penyelamatan, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/ dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan pengelolaan lingkungan	jumlah masyarakat yang diverifikasi, suport dan binaan dalam pengabdian, penyelamatan, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup	Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			jumlah masyarakat (klp/individu) yang mendapat penghargaan kalpataru		jumlah masyarakat (klp/individu) yang mendapat penghargaan kalpataru						
		Pembinaan Proper	jumlah perusahaan yang memperoleh penghargaan Proper	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/ dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan pengelolaan lingkungan	jumlah perusahaan yang memperoleh penghargaan Proper	Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Pelaksanaan penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah penyuluhan LH yang dilaksanakan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah penyuluhan LH yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/		Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	

						Kota					
		Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH	Jumlah instruktur dan penyuluh LH yang diberikan bimtek LH	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah instruktur dan penyuluh LH yang diberikan bimtek LH	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Sosisalisasi kebijakan keberadaan MHA	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	

		Identifikasi, verifikasi dan penetapan pengakuan keberadaan MHA	Jumlah MHA yang teridentifikasi, terverifikasi dan ditetapkan	Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang teridentifikasi, terverifikasi dan ditetapkan	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Pembinaan MHA	Jumlah MHA yang dibina	Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang dibina	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Penyusunan KLHS RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota		Program Perencanaan Lingkungan Hidup.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	

		Penyusunan KLHS RTRW	Jumlah Dokumen KLHS RTRW yang disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RTRW yang disusun	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota		Program Perencanaan Lingkungan Hidup.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Penyusunan KLHS untuk KRP	Jumlah dokumen KLHS Untuk KRP yang disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS Untuk KRP yang disusun	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota		Program Perencanaan Lingkungan Hidup.		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
Program Lingkungan Sehat Perumahan dan permukiman	Luas kawasan kumuh	Database Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Tersedianya Dokumen Database Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Survey dan penetapan lokasi permukiman kumuh	Tersedianya Dokumen Database Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Jumlah kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang teridentifikasi		Jumlah kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang teridentifikasi						
			Akurasi data/informasi Kawasan Perumahan dan Permukiman		Akurasi data/informasi Kawasan Perumahan dan Permukiman						

			Kumuh		Kumuh						
			Penetapan SK kawasan kumuh		Penetapan SK kawasan kumuh						
		DED kawasan kumuh	Tersedianya dokumen DED kawasan kumuh	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersedianya dokumen DED kawasan kumuh	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Penyusunan RP2KPKP	Jumlah dokumen RP2KPKP yang disusun	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Jumlah dokumen RP2KPKP yang disusun	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Jumlah dokumen laporan yang disusun		Jumlah dokumen laporan yang disusun						
		Penanganan kawasan kumuh	berkurangnya luasan kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	berkurangnya luasan kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

		Pembangunan MCK Plus-plus	jumlah MCK plus-plus yang dibangun	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	jumlah MCK plus-plus yang dibangun	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Pembangunan IPAL Kumunal	Tersedianya IPAL Komunal di kawasan perumahan dan permukiman	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Tersedianya IPAL Komunal di kawasan perumahan dan permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Fasilitasi BPS	Jumlah kegiatan BPS yang difasilitasi	Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	Jumlah kegiatan BPS yang difasilitasi	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Program pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP)	persentase Permukiman yang tertata	Fasilitasi kegiatan PISEW	Terlaksananya fasilitasi kegiatan PISEW	Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	Terlaksananya fasilitasi kegiatan PISEW	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

		Sosialisasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah peserta (masyarakat perumahan dan kawasan permukiman) yang mengikuti sosialisasi	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah peserta (masyarakat perumahan dan kawasan permukiman) yang mengikuti sosialisasi	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.			
		Data base prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan	Tersedianya Data base prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan	Perencanaan penyediaan PSU perumahan	Tersedianya Data base prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		DED Prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU) perumahan	Jumlah Dokumen DED PSU Perumahan	Perencanaan penyediaan PSU perumahan	Jumlah Dokumen DED PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Permukiman dan Perumahan	Tersedianya penerangan jalan umum (pju) dalam kawasan Permukiman dan perumahan	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Tersedianya penerangan jalan umum (pju) dalam kawasan Permukiman dan perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

		Fasilitasi Pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di kawasan permukiman dan perumahan	terfasilitasinya pengadaan penerangan jalan umum di kawasan permukiman dan perumahan	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	terfasilitasinya pengadaan penerangan jalan umum di kawasan permukiman dan perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Pembangunan Drainase Permukiman	Jumlah drainase/gorong-gorong di kawasan perumahan dan Permukiman yang dibangun	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah drainase/gorong-gorong di kawasan perumahan dan Permukiman yang dibangun	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Fasilitasi pembangunan drainase permukiman	Terfasilitasinya pembangunan drainase di wilayah permukiman	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	Terfasilitasinya pembangunan drainase di wilayah permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Pembangunan Jalan Lingkung	Panjang jalan lingkung yang dibangun	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Panjang jalan lingkung yang dibangun	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

		Fasilitas Pembangunan Jalan Lingkung	Terfasilitasinya pembangunan jalan lingkung	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	Terfasilitasinya pembangunan jalan lingkung	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Pembangunan rabat beton jalan di perumahan	terbangunnya rabat beton jalan di perumahan	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	terbangunnya rabat beton jalan di perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Fasilitas pembangunan rabat beton jalan di perumahan	Terfasilitasinya pembangunan rabat beton jalan di perumahan	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	Terfasilitasinya pembangunan rabat beton jalan di perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Pembangunan taman di kawasan permukiman	jumlah taman yang dibangun di permukiman	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	jumlah taman yang dibangun di permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

		Pembangunan RTH di kawasan Permukiman	Jumlah RTH yang dibangun di kawasan permukiman	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah RTH yang dibangun di kawasan permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni (IKU)	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang (DAK Perumahan)		Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang (DAK Perumahan)		Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

		Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk upah tukang (DAK Perumahan)		Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Program Pengembangan Perumahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, termasuk upah tukang (DAK Perumahan)		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Program Pengembangan Perumahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Bantuan penyediaan rumah beserta PSU skala perumahan (DAK Perumahan)		Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

		Penunjang/pendukung Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah kegiatan Penunjang dan operasional pembangunan rumah MBR yang dilaksanakan	Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	Jumlah kegiatan Penunjang dan operasional pembangunan rumah MBR yang dilaksanakan	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Fasilitasi pembangunan rusunawa	jumlah kegiatan pembangunan rusunawa yang difasilitasi	fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun	jumlah kegiatan pembangunan rusunawa yang difasilitasi	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Program Pengembangan Perumahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Fasilitasi pembangunan rumah khusus	jumlah kegiatan pembangunan rusus yang difasilitasi	Penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	jumlah kegiatan pembangunan rusus yang difasilitasi	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Program Pengembangan Perumahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya yang difasilitasi	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya yang difasilitasi	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

		Fasilitasi pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR oleh pengembang	Jumlah kegiatan pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR oleh pengembang yang difasilitasi	Penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana	Jumlah kegiatan pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR oleh pengembang yang difasilitasi	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Program Pengembangan Perumahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Peningkatan RTLH menjadi RLH	Jumlah rumah yang ditingkatkan	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Jumlah rumah yang ditingkatkan	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Pendampingan Kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Terlaksananya pendampingan kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	Terlaksananya pendampingan kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Data Base Perumahan By name by adress (BNBA)	Tersedianya dokumen data base perumahan By name by adress (BNBA)	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Tersedianya dokumen data base perumahan By name by adress (BNBA)	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Program Pengembangan Perumahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Jumlah rumah di Kab. Padang Pariaman		Jumlah rumah di Kab. Padang Pariaman						

			Jumlah Rumah Layak Huni (RLH)		Jumlah Rumah Layak Huni (RLH)						
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)						
			Jumlah bantuan terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		Jumlah bantuan terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)						
		Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya review dokumen RP3KP	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Tersedianya review dokumen RP3KP	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Program Pengembangan Perumahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Database perumahan pengembang	jumlah database perumahan pengembang yang disusun	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) perumahan umum/rumah susun umum	jumlah database perumahan pengembang yang disusun	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Program Pengembangan Perumahan.		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Luas Tanah yang menjadi Aset Pemda (IKU)	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	luas lahan yang dibebaskan	Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	luas lahan yang dibebaskan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	

						daerah Kabupaten/Kota					
		Inventarisasi dan Persertifikatan Tanah Pemda	jumlah sertifikat tanah aset pemda	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah Kabupaten/Kota	jumlah sertifikat tanah aset pemda	Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota		Program Penatagunaan Tanah.		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	
		Fasilitasi administrasi penggunaan tanah pemda	Jumlah kegiatan administrasi penggunaan tanah pemda yang difasilitasi	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah kegiatan administrasi penggunaan tanah pemda yang difasilitasi	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	
Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	% pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	% kasus/konflik pertanahan yang dapat diselesaikan oleh pemda	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	% kasus/konflik pertanahan yang dapat diselesaikan oleh pemda	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	

			Jumlah kasus/konflik pertanahan yang terjadi pada tahun direncanakan		Jumlah kasus/konflik pertanahan yang terjadi pada tahun direncanakan							
		Penyuluhan hukum pertanahan	Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan dimana tanahnya terkena pembangunan		Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan dimana tanahnya terkena pembangunan							
		Fasilitasi kegiatan PTSL	Jumlah kegiatan PTSL yang difasilitasi		Jumlah kegiatan PTSL yang difasilitasi							
		Fasilitasi kegiatan redistribusi lahan	Jumlah kegiatan redistribusi lahan yang difasilitasi	Inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah kegiatan redistribusi lahan yang difasilitasi	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.				

MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2021 SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN Tahun 2021**

: DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN KAWASAN

PERANGKAT DAERAH PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2019	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	
						TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
										NASIONAL	DAERAH		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	DLHPKPP						19,664,610,158						
X	XX						5,152,162,158						

X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyusunan rencana kerja tepat waktu sesuai ketentuan	530				5,152,162,158			Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	
						Persentase penyediaan Sapran dalam mendukung kegiatan kantor	60							Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	
						Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur	255							Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	

X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													104,100,000			Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah	Jumlah rencana kerja (Renja, RKT, Renstra) yang disusun.	32	8	8	3	37,100,000	DLHPK PP	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah							
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen anggaran (RKA dan DPA Awal, RKA dan DPA Perubahan yang disusun)	4	0	0	4	15,000,000	DLHPK PP	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah							
X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun	3	0	0	3	15,000,000	DLHPK PP	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah							
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	12	0	0	12	37,000,000	DLHPK PP	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah							

														publik		
X	XX	01	2.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	72	12	12	12	78,000,000	DLHPK PP dan UPTD Laboratorium Sintuk	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	
X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar, buku bacaan dan Buku Undang-undang yang disediakan selama satu tahun	28	6	6	5	10,000,000	DLHPK PP	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	
X	XX	01	2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	72	12	12	12	20,000,000	DLHPK PP	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	72	122	12	12	220,000,000	DLHPK PP	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	

						dalam dan luar daerah yang difasilitasi										
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor yang diadakan	6	1	0	1	175,000,000	DLHPK PP	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	
X	XX					Jumlah paket alat laboratorium yang diadakan	2	1	0	0		UPTD Laboratorium Sintuk	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	72	12	0	12	25,000,000	DLHPK PP	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	
X	XX					Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung laboratorium	24	12	0	12	15,000,000	UPTD Laboratorium Sintuk	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	

X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	24	4	4	4	160,000,000	DLHPK PP	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	72	12	12	12	7,000,000	DLHPK PP	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
X	XX					Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung laboratorium	24	12	0	12	50,000,000	UPTD Laboratorium Sintuk	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
X	XX	01	2.04		Peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur						102,500,000			Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah

X	XX	01	2.04	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paket penyediaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	186	0	0	125	62,500,000	DLHPK PP	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
X	XX	01	2.04	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti bimbingan teknis	101	23	5	20	40,000,000	DLHPK PP	APBD	SDM Berkualitas dan Berdayasaing	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
2	11				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						4,132,100,000				
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	272				450,000,000			Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang

2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	Jumlah dokumen Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun	1	0	0	1	150,000,000	DLHPK PP	APBD	Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang			
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						300,000,000			Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang			
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1	0	0	1	300,000,000	DLHPK PP	APBD	Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang			

						Jumlah buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kab. Padang Pariaman	8	0	0	1	-	DLHPK PP	APBD	Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	
2	11	03	2.03		Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota						25,000,000			Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi pemulihan lahan pasca tambang yang difasilitasi	1	0	0	1	25,000,000	Lubuk Alung	APBD	Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	Lubuk Alung
2	11	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).	Luas Ruang terbuka hijau	1895 95.3				830,000,000			Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	

2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3										Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	
										30,000,000							
2	11	05	2.01	02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi sebagai menghasilkan LB3	144	27	1	24	30,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	Usaha/Kegiatan	
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	272				160,000,000						
2	11	06	2.01		Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						160,000,000			Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang		

2	11	06	2.01	01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan atau izin PPLH	Jumlah proses kajian dokumen lingkungan	203	36	15	50	60,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	Usaha/Kegiatan
2	11	06	2.01	03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin LH, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	272	40	5	50	100,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	Usaha/Kegiatan
2	11	09			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah stakeholder masyarakat/keompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam penyelamatan LH	24				260,000,000			Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	
2	11	09	2.01		Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						260,000,000			Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	

2	11	09	2.01	01	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan pengelolaan lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	30	2	2	5	110,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	Kelompok Masyarakat
						Jumlah calon sekolah yang dibina program Adiwiyata	316	65	5	50	150,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	SD/SMP/SMA
2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	272				35,000,000			Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						35,000,000			Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	

2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH	Jumlah Pengaduan Masyarakat Mengenai pencemaran dan Perusakan LH yang ditindaklanjuti	29	6	0	5	35,000,000	DLHPK PP	APBD	Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan.	Persentase timbulan sampah dikelola	271.66				1,812,500,000			Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah						1,812,500,000			Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	
2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah timbulan sampah yang dapat dikelola dalam 1 tahun di Kab. Padang Pariaman	207000	23028	28000	28000	850,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	17 Kecamatan/Perusahaan/Rumah Sakit/Sekolah/

																		Pasar
						Jumlah TPA yang dibenahi	4	0	1	1	57,500,000	Ladang Laweh, Enam Lingku ng	APBD	Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengemb angan infrastruk tur berwawa san lingkung an dan tata ruang			
2	11	11	2.01	04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah calon kecamatan yang dibina	10	1	0	2	55,000,000	Kecam atan	APBD	Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengemb angan infrastruk tur berwawa san lingkung an dan tata ruang		Kecam atan	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah paket penyediaan sarana dan prasarana persampahan	6	3	1	1	850,000,000	DLHPK PP	APBD	Lingkungan Hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengemb angan infrastruk tur berwawa san lingkung an dan tata ruang			

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	04				Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman											
1	04	02			Program Pengembangan Perumahan.	Rasio Rumah Layak Huni (IKU)	1.047									
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit pembangunan rumah bagi korban bencana	10	0	0	10	175,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana	Masyarakat

1	04	02	2.05	02	Penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	jumlah kegiatan pembangunan rusus yang difasilitasi	1	0	0	1	60,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						50,000,000			Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
1	04	02	2.06	02	Penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana	Jumlah kegiatan pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR oleh pengembang yang difasilitasi	1	0	0	1	-	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah ranperda perumahan yang disusun	1	0	0	1	50,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	
1	04	03			Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.	Luas kawasan kumuh	11179.04				6,056,848,000			Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						50,000,000			Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	

1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah ranperda kawasan kumuh yang disusun	1	0	0	1	50,000,000	DLHPK PP	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
1	04	03	2.02		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1,800,000,000			Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Jumlah dokumen RP2KPKP yang disusun	1	0	0	1	400,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan

															masyarakat	
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah peserta (masyarakat perumahan dan kawasan permukiman) yang mengikuti sosialisasi	100	0	0	50	-	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Kelompok Masyarakat
1	04	03	2.02	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah kegiatan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan	5	0	0	1	1,400,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	DAK	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha						4,206,848,000			Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan	

															derajat kesehatan masyarakat
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersedianya dokumen DED kawasan kumuh	3	0	0	1	150,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
1	04	03	2.03	02	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya yang difasilitasi	2	0	0	1	1,925,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	DAK	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

						Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan	1500	0	0	25	1,450,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Usulan Musrenbang + Pokir
						Jumlah kegiatan pendampingan Program Bantuan Simultan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan	2	0	0	1	-	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	

1	04	03	2.03	03	Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	Jumlah kegiatan BSPS yang difasilitasi	3	0	0	1	125,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
						Jumlah kegiatan Penunjang dan operasional pembangunan rumah MBR yang dilaksanakan	5	1	1	1	400,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah kegiatan penunjang dan operasional penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh yang difasilitasi	2	0	0	1	156,848,000	Kabupaten Padang Pariaman	DAK	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

1	04	04			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Persentase Permukiman yang tertata	150				1,775,000,000			Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
1	04	04	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						1,775,000,000			Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

1	04	04	2.01	01	Perencanaan penyediaan PSU perumahan	Jumlah Dokumen DED PSU Perumahan	3	0	0	1	100,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	
1	04	04	2.01	02	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	jumlah MCK plus-plus yang dibangun	7	0	0	1	-	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Perumahan/ Kawasan Permukiman
						Jumlah drainase/gorong-gorong di kawasan perumahan dan Permukiman yang dibangun	15	0	0	5	500,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan	Perumahan/ Kawasan Permukiman

													masyarakat			
						Panjang jalan lingkung yang dibangun	4000	0	0	300	500,000, 000	Kabupa ten Padang Pariam an	APBD	Infrastrukt r untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningka tan kualitas sumberd aya manusia dan peningka tan derajat kesehata n masyarak at	Peruma han/ Kawasa n Permuk iman
						Jumlah paket pembangunan rabat beton jalan di perumahan	6	0	0	2	500,000, 000	Kabupa ten Padang Pariam an	APBD	Infrastrukt r untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningka tan kualitas sumberd aya manusia dan peningka tan derajat kesehata n masyarak at	Peruma han/ Kawasa n Permuk iman
						jumlah taman yang dibangun di permukiman	2	0	0	1	-	Kabupa ten Padang Pariam an	APBD	Infrastrukt r untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningka tan kualitas sumberd aya manusia dan peningka tan derajat kesehata	Peruma han/ Kawasa n Permuk iman

						Jumlah RTH yang dibangun di kawasan permukiman	2	0	0	1	-	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Perumahan/ Kawasan Permukiman
						Jumlah fasilitas pemakaman yang dibangun di kawasan permukiman	1	0	0	1	100,000,000	Sungai Sirahkuranji Hulu Kampung Kaciak Sungai Geringging	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Usulan Musrenbang
1	04	04	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	jumlah kegiatan pembangunan drainase di wilayah permukiman yang difasiltiasi	5	0	0	1	25,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan derajat kesehatan	

2	10	04			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.	% pengaduan masyarakat yang diselesaikan	500				180,000,000			Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota						180,000,000			Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan	Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Kab.Padang Pariaman	38	8	3	8	80,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
2	10	04	2.01	02	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	% kasus/konflik pertanahan yang dapat diselesaikan oleh pemda	100	100	100	100	100,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah

2	10	05			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.	Luas Tanah yang menjadi Aset Pemda (IKU)	935.43									Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	
2	10	05	2.01		Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota											Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	
2	10	05	2.01	01	Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	luas lahan yang dibebaskan	163603	77426	50000	50000	1,553,500,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	Masyarakat		
2	10	05	2.01	04	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota	Jumlah kegiatan administrasi penggunaan tanah pemda yang difasilitasi	5	0	0	1	120,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah			
2	10	06			Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	% pengaduan masyarakat yang diselesaikan	500									Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	

2	10	06	2.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										200,000,000			Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
2	10	06	2.01	01	Inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah kegiatan redistribusi lahan yang difasilitasi	2	0	0	1					200,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
2	10	10			Program Penatagunaan Tanah.	Luas Tanah yang menjadi Aset Pemda (IKU)	935.43								150,000,000			Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota										150,000,000			Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah Kabupaten/Kota	jumlah sertifikat tanah aset pemda	21	7	3	5					150,000,000	Kabupaten Padang Pariaman	APBD	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2021 ini didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman periode 2016-2021 yang telah ditetapkan dan berisi program dan kegiatan tahun 2021 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan pelayanan dan fasilitasi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen di masyarakat dan di internal Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh personel di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal.

Rencana Kerja Tahun 2021 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021, didalam implementasinya perlu dilengkapi dengan dokumen turunan ataupun dokumen pelengkap (Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja dan lain-lain) agar lebih mudah dalam implementasi dan pengoperasionalannya serta lebih memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian target dan kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutannya. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat segera terwujud. Demikian untuk dilaksanakan.

Pariaman, Mei 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Padang Pariaman

Ir. YUNISWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199203 1 014